No. 188 Oktober 2021

BaKTI News

www.baktinews.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

NANDO WATU, PULANG MEMBANGUN KAMPUNG

DESA RAMAH ANAK

GOTONG ROYONG PERTANIAN UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X
9 771979 777057

BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA
ISSN 1979-777X
www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab M. YUSRAN LAITUPA
ZUSANNA GOSAL
Editor VICTORIA NGANTUNG
ITA MASITA IBNU

Editor Foto ICHSAN DJUNAED
Design & Layout ICHSAN DJUNAED
Sirkulasi KHAIRIL ANWAR

Redaksi
Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383
Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id
Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI Instagram @InfoBaKTI

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTINews is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews
Contributing to BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTINews accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTINews does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.

MENJADI PELANGGAN BaKTINews
Subscribing to BaKTINews

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTINews Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTINews langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTINews cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

You may fill out the form available on the BaKTINews Online page to be able to receive BaKTINews magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTINews magazine at the BaKTI office on weekdays.

Daftar Isi

BaKTINews Oktober 2021 No. **188**

1 Nando Watu, Pulang Membangun Kampung
Oleh **SUMARNI ARIANTO**

5 Kader Kampung dan Perannya dalam Pembangunan Kampung
Oleh **HALIA ASRIYANI**

10 Mengapa Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Persiapan Bencana Berdampak Lebih Baik
Oleh **PRADYTIA PUTRI PERTIWI, AMANDA HOWARD, AARON OPDYK, THUSHARA DIBLEYE**

13 Situasi Kemiskinan Selama Pandemi
Bagian 2 (Selesai)
Oleh **RIDHO AL IZZATI**

17 Desa Ramah Anak
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

21 Menghidupkan Kebiasaan Berkompos di Kota Daeng
Oleh **SHERLY HEUMASSE**

25 Perubahan Iklim Ancam Lukisan Purba di Sulawesi?
Oleh **EKO RUSDIANTO**

30 Kobaran Semangat di Kelas AKSI
Oleh **SYAIFULLAH**

33 Gotong Royong Pertanian Untuk Kesejahteraan Bersama
Oleh **ITA IBNU**

37 Orang-orang Maluku dan Deklarasi 16 September 1945
Oleh **Dr. INDRA ISKANDAR**

40 Inisiatif Cerdas di *Road to* Festival Forum KTI

Foto Cover: **Adwit B. Pramono/Yayasan BaKTI**

Foto: **Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI**

NANDO WATU PULANG MEMBANGUN KAMPUNG

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

Di kaki gunung Kelimutu, yang berdiri kokoh di tanah Ende, Flores Timur, NTT terdapat sebuah desa kecil yang kaya akan potensi dan keunggulan. Kaya akan sumber daya alam pun dengan sumber daya manusianya. Desa tersebut bernama Detusoko. Sebuah desa yang beberapa tahun terakhir ini giat mengembangkan diri sebagai desa wisata.

Adalah Ferdinandus Watu atau yang akrab disapa Nando seorang anak muda desa dengan mimpi besar yang berhasil mengantar desanya menjadi salah satu desa maju yang semakin dikenal. Nando bersama Remaja Mandiri Community (RMC) yang dibentuknya melakukan kerja-kerja pembangunan yang dimulai dengan pengembangan kapasitas anak muda desa sebagai aset penggerak pembangunan kampung.

RMC merupakan komunitas yang bertumpu dan digerakkan oleh kaum muda. RMC memanggil kaum muda Detusoko untuk kembali ke kampung. Komunitas ini membangun kesadaran untuk mengenal lebih jauh potensi desa. Selanjutnya bersama-sama belajar mengolah produk-produk lokal. Termasuk pula menyentuh pariwisata dan kekayaan budaya setempat. Karena itu RMC mengedepankan konsep *ecotourism* yang berbasis kearifan lokal, pertanian dan kewirausahaan berkelanjutan.

Foto: Tangkapan layar Youtube/British Council

Sebagai anak petani yang dibesarkan di desa, pengalaman mengubah motivasi dan cara pandang Nando. Pengalaman dan interaksinya dengan komunitas lokal dan internasional membuatnya menemukan makna bahwa pembangunan berkelanjutan berakar pada perspektif orang-orang lokal atau yang Nando sebut *The Future we want is indigenous perspective and action.* Bahwa cara pandang orang lokal adalah domain masa depan kita. Ia pun menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan juga diarahkan pada pembangunan yang ramah lingkungan.

Nando pada sebuah kesempatan berkenalan dan berinteraksi dengan komunitas pangan lokal. Bersama Maria Loretha -salah satu pegiat pangan lokal di Flores- ia menghidupkan kembali pangan lokal. Ia diperkenalkan dengan Yayasan KEHATI. Bersama Yayasan KEHATI, ia ikut serta pada kunjungan ke India Selatan tepatnya di Megalaya konferensi internasional, kegiatan yang mengusung gerakan *Slow Food*. Di sana ia bertemu dan berinteraksi dengan banyak pemuda-pemudi dari seluruh dunia. Melalui interaksinya itu ia menyadari bahwa secara global pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan ramah lingkungan. "Menurut saya SDGs rohnya ada di desa karena cara pandang orang desa jauh lebih holistik". Banyak kearifan lokal di desa yang belum digali dengan maksimal. "Bicara pangan bicara tentang identitas". Ini kemudian yang menggerakkan Nando. Banyak pemuda-pemudi Flores yang memilih merantau ke Jawa dan Bali. "Di kampung halaman, orang berpendidikan hilang. Energi pendidikan semua keluar. Desa butuh kehadiran kita, kehadiran pemuda" ungkapnya.

Kondisi sosial ekonomi Detusoko

Sebanyak 90% warga desa Detusoko adalah petani. Desa ini terdiri dari 213 KK. Detusoko menjadi trans, persinggahan wisatawan yang hendak menuju gunung Kelimutu. Hal ini dipandang sebagai sebuah peluang strategis karena wisatawan selalu melewati desa Detusoko. Detusoko mempunyai banyak potensi seperti padi, kakao, kopi dan banyak lagi lainnya. Tapi yang jadi persoalan selama ini adalah warga tidak tahu mau dijual kemana potensi ini, biasanya hanya dijual ke pasar, seperti diketahui ada permainan harga oleh tengkulak.

Ketika berbicara tentang lapangan pekerjaan, orientasi anak muda sebelumnya masih sebatas menjadi PNS. Mereka beranggapan jika bersekolah maka harus kerja di kantor. Selain itu komitmen dan motivasi anak muda desa lebih banyak ingin mencari pekerjaan di luar padahal menurut Nando di kampung sendiri banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Kondisi ini kemudian menjadi panggilan baginya sebagai generasi penerus.

Tantangan bagaimana meyakinkan warga desa

Status sosial di Flores terutama di Ende masih sangat terpengaruh dari seberapa didengarnya kita. Tidak peduli setinggi apa pendidikannya. Cara pandang menggerakkan massa sering kali dianggap ada agenda khusus dibaliknya misalnya cari dana atau dukungan. Tantangan lainnya adalah warga desa selalu menuntut bukti, hasil dari kerja-kerja yang sudah dilakukan. Ketika ada hasil nyata maka ini akan menjadi alat ukur atau alat advokasi yang kuat. Cara yang ditempuh Nando mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan energi positif dari dalam diri, berani untuk memulai, dan seiring waktu proses pembelajaran pun terjadi.

Cara menggerakkan warga untuk bergabung dalam Remaja Mandiri Community

Di awal mulai bergerak, tidak mudah bagi Nando menemukan orang-orang dengan kesamaan visi. Selalu ada kecurigaan. Nando kemudian membentuk Remaja Mandiri Community (RMC) sebagai ruang diskusi, ruang berbagi. Kegiatan diawali dengan diskusi kecil dengan beberapa teman. Untuk memotivasi dan memperkenalkan ruang kegiatan bersama digunakan media sosial yakni Facebook. Awalnya kegiatan dibuat di ruang kegiatan belajar gereja. Kegiatan awal berupa gerakan literasi dengan perpustakaan.

Kegiatan utama RMC adalah literasi, kemudian seiring waktu berkembang dengan kegiatan kursus bahasa Inggris untuk pemuda desa. RMC memberi ruang untuk remaja membuka wawasan dan meningkatkan kapasitas. Salah satu kegiatan dalam komunitas adalah pengembangan produk unggulan desa seperti kopi. Komunitas memberi anak muda ruang luas untuk berinteraksi dengan banyak sumber ilmu pengetahuan.

Program utama RMC adalah pertama, menyediakan ruang literasi berupa perpustakaan ruang baca. Dalam ruang literasi ini dihadirkan kegiatan edukasi informal, seperti pelatihan, pengenalan informasi dan motivasi bagaimana mengakses beasiswa dan peluang-peluang pendidikan lainnya. Kerja sama dilakukan dengan beberapa mitra diantaranya dengan CoKalbe, untuk menyekolahkan anak desa sesuai latar belakang yang ada di kampung agar setelah selesai mereka bisa pulang dan membangun desa.

Program yang kedua adalah pertanian berkelanjutan dengan menghidupkan kembali pangan lokal seperti sorgum, jewawut, wijen dengan cara bekerja sama dengan Yayasan Kehati dan perhimpunan petani pangan lokal NTT.

Program ketiga adalah kewirausahaan sosial, kegiatannya berupa menciptakan aneka produk dari hasil pertanian Detusoko yang dikolaborasikan dengan beberapa mitra seperti Javara dan sekolah seniman pangan untuk menciptakan produk-produk pertanian bernilai ekonomi tinggi.

Yang keempat adalah *decotourism* atau Detusoko *ecotourism*, sebuah model kewirausahaan untuk menjual jasa paket-paket wisata. Di Desa Detusoko telah dibuat *homestay* dengan melibatkan warga desa. Jadi ketika wisatawan datang sudah tersedia fasilitas akomodasi untuk mereka. Saat ini sudah ada 17 homestay yang tersedia.

Keempat kegiatan RMC tadi berjalan secara terintegrasi. Misalnya ketika wisatawan datang ia punya waktu 1 jam berinteraksi berbagi pengalaman dengan anak, pemuda anggota komunitas RMC di kelas, lalu wisatawan juga bisa menikmati aktivitas di kampung seperti salah satu program *one day be a farmer* yang ditawarkan. Lalu dari hasil pertanian desa dibuat produk yang kemudian bisa dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan. Paket wisata desa ini yang kemudian dikemas dan dipasarkan Nando bersama RMC.

Bekerja Dalam Sistem

Selain membangun kampung melalui komunitas, pada tahun 2019, Nando terpilih sebagai kepala desa. Ia terpilih berkat kepiawaiannya dalam mengampuh RMC sehingga

oleh warga dan tetua menaruh kepercayaan kepadanya. RMC memberikan Nando pondasi dasar untuk bisa menjadi pemimpin yang mampu membawa Detusoko ke arah yang lebih baik. Sebagai orang yang pernah terlibat aktif di LSM, Nando percaya bahwa 3 indikator yang dibutuhkan untuk membuat perubahan di masyarakat yaitu perubahan perilaku, sejauh mana regulasi mendukung ide dan dari sisi keberlanjutan serta sisi penganggaran. Ketiga indikator ini kemudian yang memotivasinya untuk merasa harus berada di dalam sistem, karena ia percaya dengan berada dalam sistem, tujuan-tujuannya akan lebih cepat tercapai.

Dampak

Kerja-kerja Nando dan RMC berbuah manis, banyak hal baik sudah terjadi di Detusoko. Secara internal untuk RMC sendiri sebagai sebuah komunitas adalah peningkatan kapasitas para anggota. Kapasitas dari sisi akademis, kemampuan berorganisasi dan tentunya keterampilan. Kini dari tangan-tangan terampil kaum muda dan penduduk Detusoko tercipta produk-produk unggulan desa bernilai ekonomis

Foto-foto: **Dok. Nando Watu**

sebut saja *peanut butter* atau selai kacang, Moni Marmalade, Koro Dagalai Sauce, kopi dan produk lainnya.

Geliat kegiatan *ecotourism*, pengembangan produk lokal tentunya berdampak pula pada ekonomi masyarakat. Sebut saja penghasilan yang diperoleh warga dari biaya sewa *homestay* saat ada kegiatan pelatihan, peserta menginap di rumah penduduk dan ini menjadi pemasukan bagi warga pemilik dan tentunya penghasilan dari penjualan produk lokal desa.

Konsep kewirausahaan juga diaplikasikan di BUMDes. Dibuat pasar *online* desa yakni pasarkita.bumdes.mart.id. Pembeli dapat memesan lewat WA *store*, seminggu dua kali. Pandemi membuat warga Detusoko berpikir adaptif untuk memasarkan produk secara *online*. Sejauh ini omset per bulan mencapai 35 jutaan. Tentunya dari hal ini ada penyerapan tenaga kerja juga dari anak muda, kerja sama juga dilaksanakan dengan 4 pemilik kendaraan *pickup*, ojek sekitar 15 unit, kerja sama dengan 60an petani sebagai pemasok di 3 kecamatan. Konsep kewirausahaan yang diusung memberi banyak manfaat untuk banyak orang di desa.

Kekuatan mimpi

Sebagai komunitas, RMC terbilang sudah maju. Ke depannya Nando punya mimpi untuk membuat Detusoko *Creative Hub* yang punya sistem informasi yang memungkinkan warga desa mengakses informasi tingkat nasional. "Karena kami di desa masih terbatas akses informasi misalnya info beasiswa ke luar negeri, info program-program kreatif" ungkap Nando. Ia berharap anak-anak Ende bisa menuntut ilmu lebih jauh sesuai potensi yang ada di desa.

Keberlanjutan

Tim dalam organisasi pemerintahan desa Detusoko sendiri didominasi oleh anak muda. Saatnya banyak anak muda bergabung dalam sistem untuk melanjutkan estafet pembangunan. Strategi yang dikembangkan Nando adalah menggerakkan/mengarahkan anak-anak muda agar setelah selesai sekolah kembali ke kampung. Mereka bisa bergabung dalam sistem desa, bisa masuk dalam kepengurusan BUMDes, koperasi atau kelompok tani. "Kita perlu membangun ruang untuk anak desa sekembalinya mereka ke kampung" kata Nando. Menurut Nando secara anggaran itu sangat memungkinkan. Ia berharap kita jangan terlalu apatis dengan sistem yang ada di desa, karena desa adalah halaman depan bangsa. Perubahan benteng NKRI ada di desa, masuklah bermain dalam sistem yang ada di desa. Hal ini adalah salah satu upaya membangun desa.
Detusoko saat ini menjadi pusat belajar banyak komunitas di NTT. Orang-orang datang belajar di Detusoko. Pengajar dan narasumber adalah warga desa yang sudah terlatih. Tak jarang, malah warga desa yang diundang untuk memberi pelatihan di tempat lain.

Nando membuktikan bahwa dirinya bisa membangun desa dengan kemampuan yang dimiliki dan potensi yang ada di desa. Bersama warga ia membangun dengan mengoptimalkan sumber daya desa. Ia pulang meninggalkan kota untuk kembali membangun desa, membangun kampung halamannya. Diperlukan lebih banyak lagi Nando-Nando yang lain karena desa adalah halaman depan bangsa, bertumbuhnya bangsa ini dimulai dari menumbuhkan halaman depan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ferdinandus Watu, melalui email: **fernandowatu70@gmail.com**

Oleh **HALIA ASRIYANI**

KADER KAMPUNG DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG

Dalam membangun kampung, semua orang harus bekerja sama, tidak bisa jalan sendiri-sendiri." Ungkap Yakobus F. Ramar, Kepala Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Apa yang disampaikan oleh Pak Yakobus tentu benar adanya. Setiap pihak yang ada memiliki perannya masing-masing dalam memajukan suatu wilayah. Dengan menjalankan peran masing-masing dengan baik dan bertanggung jawab akan memberikan dampak pada pengembangan dan pembangunan desa ke arah yang dicita-citakan bersama.

Foto: **Halia Asriyani/KOMPAK-LANDASAN II**

Foto: **Halia Asriyani/KOMPAK-LANDASAN II**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya membawa perubahan paradigma pembangunan di Indonesia termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berskala lokal desa melekat pada kewenangan yang diberikan kepada desa atau yang disebut sebagai "kampung" di wilayah Papua dan Papua Barat. Dengan diakui dan dihormatinya hak-hak desa ini oleh pemerintah, maka desa harus sudah memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri. Salah satu unsur yang akan terlibat dalam pengawalan implementasi Undang-Undang Desa dan pembangunan kampung di wilayah Papua dan Papua Barat adalah kehadiran Kader Kampung.

Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa disebutkan bahwa salah satu pendamping desa adalah dari unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang selama ini sudah terlibat secara aktif dalam proses pembangunan di desa.

Konsekuensi lain dari adanya Undang-Undang Desa yang menganut asas rekognisi dan subsidiaritas adalah lahirnya sudut pandang baru dalam pembangunan desa, di mana kini desa menjadi subjek pembangunan yang mengatur dan menggerakkan pembangunannya secara mandiri berdasarkan hak dan kewenangan yang dimiliki. Selain itu, Desa kini menjadi ruang bagi warga desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri.

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusia yang berkapasitas dan mumpuni untuk menjalankan fungsi sebagai pengelola desa. Kaderisasi desa menjadi kegiatan yang sangat strategis bagi terciptanya desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kaderisasi desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat desa di segala kehidupan, utamanya pengembangan kapasitas di dalam pengelolaan desa secara demokratis. Makna kata "kader" sendiri sebagaimana lazim dipahami dalam sebuah organisasi adalah orang yang dibentuk untuk memegang peran penting dan memiliki komitmen serta dedikasi kuat untuk menggerakan organisasi mewujudkan visi misinya.

Foto: **Halia Asriyani/KOMPAK-LANDASAN II**

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pola pendampingan desa mengalami perubahan. Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat sebelum ditetapkannya Undang-Undang Desa, kader-kader di desa cenderung dibentuk melalui penugasan supra desa dan menjadi bagian dari prasyarat proyek, serta bekerja didasarkan atas skema petunjuk teknis yang rinci. Namun cara pandang baru setelah Undang-Undang Desa dicirikan dengan adanya perubahan pola pendampingan desa. Dari yang semula berkarakter mengontrol dan memobilisasi partisipasi masyarakat, berubah menjadi fasilitasi gerakan pembaharuan desa sebagai komunitas yang mandiri dan partisipatif dengan kesadaran penuh sebagai masyarakat yang berdaya. Dengan demikian kader desa adalah orang yang akan menjalankan fungsi fasilitasi dan pendampingan masyarakat di desa dalam upaya implementasi dari undang-undang desa ini.

Dalam konteks pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Yayasan BaKTI melalui Program KOMPAK-LANDASAN menjadi lembaga yang bekerja untuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar berkualitas di kedua provinsi tersebut menyadari bahwa dalam upaya pembangunan dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak dalam sebuah perencanaan yang bersinergi antara kampung dan unit layanan. Di samping itu, dalam menyusun perencanaan juga dibutuhkan data atau informasi tentang masyarakat dan kondisi wilayah tersebut agar perencanaan yang dibuat berbasis fakta. Dengan demikian program yang dihasilkan bisa tepat sasaran untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.

Kader kampung merupakan salah satu pihak yang mengambil peran besar dalam upaya pembangunan ini. Terutama dalam penyiapan sistem informasi kampung, juga keterlibatannya dalam proses perencanaan di kampungnya. Kader kampung ini adalah orang-orang potensial di kampung baik perempuan maupun laki-laki dalam kedudukannya yang sejajar. Kader-kader

Foto: **Halia Asriyani/KOMPAK-LANDASAN II**

kampung di Papua dan Papua Barat sendiri pun dipilih bersama berdasarkan kapasitas, kemauan dan keterlibatan dalam berbagai agenda pembangunan kampung. Mereka juga adalah orang yang memang berasal dari kampung tersebut dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kondisi wilayahnya sehingga akan membantu dalam melakukan pendampingan.

Sejak tahun 2017, KOMPAK-LANDASAN telah bekerja di wilayah Papua dan Papua Barat. Selama itu pula, keberadaan dan peran para kader-kader kampung sangat membantu dalam mencapai tujuan program yang diharapkan. Sejumlah penambahan kapasitas pun turut diberikan bagi para kader-kader kampung ini. Pada tahun 2021 ini, sejumlah 715 kader kampung di Papua dan Papua Barat telah dilatih dalam penyiapan dan pengelolaan sistem informasi kampung. Pengetahuan yang mereka peroleh selanjutnya diterapkan di kampung masing-masing. Tim KOMPAK-LANDASAN pun terlibat mendampingi kader kampung secara langsung dalam proses pendataan dan penginputan data sistem informasi kampung tersebut. Sistem informasi kampung ini akan bermanfaat dalam menyediakan data yang diperlukan dalam berbagai upaya mewujudkan pembangunan kampung.

Salah satu kader kampung yang didampingi oleh tim KOMPAK-LANDASAN adalah Rony Jaisona. Kini ia adalah Kepala Kampung Marsi di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat setelah sebelumnya bertugas sebagai kader kampung di kampungnya tersebut. Pengalamannya sebagai kader kampung dalam mengawal sejumlah program dan mendampingi masyarakat baginya adalah sebuah pembelajaran berharga. “Sebagai kader kampung, saya banyak sekali belajar, ilmu yang saya peroleh selama menjadi kader kampung ini pun saya jadikan bekal dalam memimpin kampung saya saat ini,” Ungkap Rony.

Kader kampung sendiri dapat memperoleh insentif melalui dana kampung. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kampung kini memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pembangunan dan penganggarannya yang didukung dengan adanya dana kampung.

Foto: **Halia Asriyani/KOMPAK-LANDASAN II**

Dengan demikian, kader kampung dapat fokus pada tugas dan fungsinya membantu kepala kampung dalam berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan kampung.

"Saya bangga bisa bekerja untuk kemajuan kampung saya sendiri," ungkap Paskalina F. Taranop, Kader Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel. Senada dengan Paskalina, Milka Tiert dari Kampung Ambora, Distrik Demta Kabupaten Jayapura juga menyampaikan perasaannya bekerja untuk kemajuan kampungnya. "Kami semangat menjadi kader, karena ini demi kampung sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau liat kita pu kampung to," paparnya.

Ke depannya, para kader kampung di Papua dan Papua Barat diharapkan dapat terus mendampingi dan memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan kewenangan kampung, tata pemerintahan kampung, serta perencanaan dan penganggaran kampung yang semuanya mengarah pada pembangunan kampung untuk kesejahteraan masyarakat. Menjadi kader kampung yang inovatif, partisipatif dan progresif sehingga memberi intervensi dalam menjadikan kampung sebagai basis bermasyarakat yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Kader kampung, sebagaimana pula seluruh elemen yang ada dalam kampung, memiliki perannya masing-masing yang penting bagi kemajuan kampung. Baik itu aparat kampung maupun masyarakat, tak terkecuali pula kader kampung. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Distrik Oransbari, Yakobus F. Ramar di atas, bahwa membangun kampung harus dilakukan bersama-sama. Dengan adanya kader kampung yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, diharapkan upaya pembangunan bagi Papua dan Papua Barat dapat berjalan dengan lebih maksimal dan efektif.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi **info@bakti.or.id**

Paulo (kiri) dan Abilio (kanan) dari RHTO berpartisipasi dalam community assessment setelah banjir Dili pada Maret 2020. Kurang dari 24 jam setelah banjir, Oxfam di Timor-Leste dan RHTO mengerahkan dua tim untuk memastikan penyandang disabilitas diikutsertakan dalam respon kemanusiaan.
Foto: **Reginald Ramos / Oxfam di Timor-Leste**

Mengapa Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Persiapan Bencana Berdampak Lebih Baik

Oleh **PRADYTIA PUTRI PERTIWI, AMANDA HOWARD, AARON OPDYK, THUSHARA DIBLEYE**

Dalam bencana, penyandang disabilitas kerap kali tak terlihat. Mereka tak terjamah karena sistem yang terbangun sebelum bencana menyulitkan mereka untuk terlibat.

Tanpa disadari, aktor pegiat kemanusiaan juga dapat meminggirkan kelompok-kelompok lokal sehingga membuat penyandang disabilitas semakin tak terlihat.

Penelitian kami di Timor Leste menunjukkan bahwa ketika aktor penggiat kemanusiaan bekerja bersama Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) sebelum bencana, penyandang disabilitas akan memiliki peran lebih aktif dalam situasi tanggap bencana.

Dengan persiapan semacam ini, akan memberi dampak lebih baik bagi penyandang disabilitas.

Peran OPD Lokal

Di negara berkembang seperti Timor Leste, aktor penggiat kemanusiaan internasional memiliki peran yang signifikan untuk merespons bencana. Langkah-langkah yang mereka ambil bisa berpotensi untuk mendukung atau menghambat peran OPD di tingkat lokal untuk berpartisipasi dalam respons bencana.

Sebagai contoh, OPD nasional Timor Leste yaitu Ra'es Hadomi Timor Oan (RHTO) telah bekerja sama dengan Oxfam terkait program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang secara inklusif melibatkan penyandang disabilitas sejak 2018. Program ini adalah bagian DISASTER READY yang merupakan program inisiatif Australia Humanitarian Partnership antara pemerintah Australia dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Oxfam dan RHTO telah membangun hubungan kerja sama sejak banjir yang melanda Dili pada Maret 2020. Pada tahun berikutnya, Badai Seroja mengakibatkan banjir yang lebih besar lagi.

Kerja sama pada Maret 2020 merupakan tanggap bencana pertama bagi pemerintah Timor Leste yang melibatkan OPD. Pada awalnya, pemerintah dan RHTO sama-sama khawatir untuk saling bekerja sama. Namun, dengan adanya dukungan teknis dari Oxfam, kerja sama tersebut menjadi pengalaman yang positif bagi keduanya.

RHTO membantu upaya pemerintah untuk melakukan asesmen dan respons bencana dengan mengidentifikasi penyandang disabilitas yang merupakan korban bencana. RHTO lebih lanjut membuat rekomendasi agar pemerintah dapat meningkatkan kualitas inklusi disabilitas dalam asesmen dan respons bencana mereka.

RHTO juga bekerja sama dengan pemerintah dan Oxfam untuk memastikan bahwa hunian untuk penyandang disabilitas dibangun kembali dengan lebih baik.

Hasil kerja sama yang positif yang memberi pembelajaran bagi kedua belah pihak dalam membangun fondasi untuk respons bencana yang semakin inklusif terhadap disabilitas pada 2021.

Pada 4 April 2021, Timor Leste diterjang oleh banjir yang terparah sepanjang sejarah. Hujan deras akibat Badai Siklon Seroja menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang yang melanda 13 kota.

Tiga puluh dua orang meninggal. Lebih dari 30.000 rumah tangga terdampak.

Sekitar 6,7% masyarakat yang terdampak bencana adalah penyandang disabilitas menurut data Sekretaris Negara untuk Perlindungan Sipil Timor Leste pada Juli 2021.

Mengapa Kita Perlu Lebih Banyak Melibatkan OPD

Penyandang disabilitas di Timor Leste, seperti layaknya di negara lain, secara konsisten lebih berisiko tertinggal pada saat dan setelah terjadi bencana.

Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas data disabilitas. Hal ini menghalangi langkah untuk memahami, merencanakan, dan menyasar kebutuhan dan kapasitas penyandang disabilitas. Data yang kurang dapat diandalkan dan detail menjadi kunci permasalahan yang menghalangi penanggulangan bencana yang inklusif.

Di negara berkembang seperti Timor Leste dan Indonesia, faktor-faktor budaya dapat menyebabkan penyandang disabilitas "tersembunyi" di masyarakat. Hal ini mempersulit identifikasi penyandang disabilitas melalui sensus atau survei skala nasional lainnya.

Akibatnya, hasil data penyandang disabilitas kerap kali tidak mutakhir atau tidak reliabel.

Sebagai contoh, di Indonesia prevalensi disabilitas berkisar antara 4-11%. Angka ini bervariasi disebabkan karena perbedaan cara yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengukur disabilitas.

Karena alasan yang sama, sulit untuk meyakini bahwa data penyandang disabilitas terdampak bencana banjir di Timor Leste sebesar 6,7% sebagai data yang akurat.

Hal ini karena asesmen pascabencana di Timor-Leste identifikasi data disabilitas belum menggunakan *Washington Group Questions*- alat

Rendahnya kualitas data disabilitas menghalangi langkah untuk memahami, merencanakan, dan menyasar kebutuhan dan kapasitas penyandang disabilitas. Data yang kurang dapat diandalkan dan detail menjadi kunci permasalahan yang menghalangi penanggulangan bencana yang inklusif.

ukur yang dianggap terbaik untuk untuk pendataan disabilitas.

Lebih lanjut, faktor struktural lain dapat meningkatkan kecenderungan penyandang disabiitas untuk terdampak negatif dari bencana.

Di Timor Leste, penyandang disabilitas memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Mereka juga tinggal di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi - seperti di perbukitan yang rentan tanah longsor dan juga di dekat sungai.

Akses informasi juga mungkin belum inklusif untuk penyandang disabilitas, atau mereka tertinggal karena stigma sosial.

Pada saat bencana, penyandang disabilitas tidak bisa mengevakuasi secara mandiri atau memerlukan dukungan tambahan.

Penyandang disabilitas dapat berperan aktif dan bermakna pada saat bencana, dan tidak hanya dipandang sebagai korban yang "diselamatkan". Akan tetapi, stigma sosial membatasi kesempatan mereka untuk terlibat.

Respons Bencana yang Lebih Inklusif

Selain meningkatkan rasa percaya diri para anggotanya, jalinan kerja sama RHTO dengan pemerintah Timor Leste dan aktor kemanusiaan lainnya juga meningkatkan kapasitas untuk merespon bencana dengan lebih cepat pada tahun 2021.

Dalam hitungan jam, relawan dan staf RHTO yang kesemuanya memiliki pengalaman hidup dengan disabilitas membantu proses evakuasi, asesmen, dan mendukung kebutuhan penyandang disabilitas.

Melalui kerja sama dengan Australian Humanitarian Partnership, RHTO memonitor aksesibilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas di lokasi evakuasi, membantu mendistribusikan bantuan, dan memastikan penyandang disabilitas terlibat aktif dalam asesmen yang dilakukan oleh pemerintah.

Kehadiran mereka penting dalam membantu aktor kemanusiaan memprioritaskan inklusi disabilitas.

Pada tahap awal respons bencana, bahasa dan aksi dari pemerintah Timor-Leste menunjukkan bahwa mereka mengakui pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas sebagai aktor respons bencana dan sebagai masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.

Sebagai contoh, pemerintah mendukung permintaan RHTO untuk mengalokasikan sebagian dana dari pemerintah Australia untuk membeli dan mendistribusikan berbagai kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini memungkinkan RHTO untuk mendukung penyandang disabilitas sebelum distribusi bantuan datang dari organisasi internasional lain atau dari pemerintah.

Investasi Dalam Kesiapsiagaan

Kemitraan strategis antara OPD dan aktor internasional sebelum bencana dapat mendorong pencapaian tanggap bencana yang lebih inklusif disabilitas.

Aktor internasional dapat mendukung respons bencana dengan menciptakan peluang untuk OPD mengembangkan kecakapan dan pengetahuan. Hal ini mendorong OPD untuk membangun hubungan dengan pemerintah dan aktor kemanusiaan sebelum terjadi bencana.

Lebih penting lagi, OPD dapat menjadi bukan saja yang terdepan dalam menunjukkan peran dalam mendukung kesiapsiagaan dan respons bencana yang inklusif, namun juga dalam mematahkan stigma sosial terhadap disabilitas.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Associate Country Director (Program Director) Oxfam di Timor Leste ikut menulis artikel ini. Para penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada **Paulus Neves** dan **Eduardo Tilman da Silva Texiera** dari Ra'es Hadomi Timor Oan (RHTO) untuk kontribusi mereka pada artikel ini.

Artikel ini bersumber dari **https://theconversation.com/mengapa-melibatkan-penyandang-disabilitas-dalam-persiapan-bencana-memiliki-dampak-lebih-baik-167269**

SITUASI KEMISKINAN SELAMA PANDEMI

Bagian **II** (Selesai)

Oleh **RIDHO AL IZZATI**

Cara Bertahan Rumah Tangga Selama Krisis

Dari penjelasan di tulisan sebelumnya terdapat bukti bahwa tingkat kesejahteraan sebagian besar rumah tangga di Indonesia menurun selama krisis akibat pandemi COVID-19. Untuk mencukupi kebutuhan hidup selama pandemi, beberapa strategi diterapkan oleh rumah tangga. Gambar 5 menunjukkan beberapa *coping mechanism* yang umum dilakukan untuk mengatasi penurunan kesejahteraan. Cara yang paling umum dilakukan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari antara lain dengan menjual atau menggadaikan barang, mengurangi pengeluaran non makanan, meminjam uang kepada kerabat, mengurangi pengeluaran makanan, dan mekanisme lainnya. Hanya 15% rumah tangga yang melaporkan bahwa kebutuhan hidup mereka sudah terpenuhi.

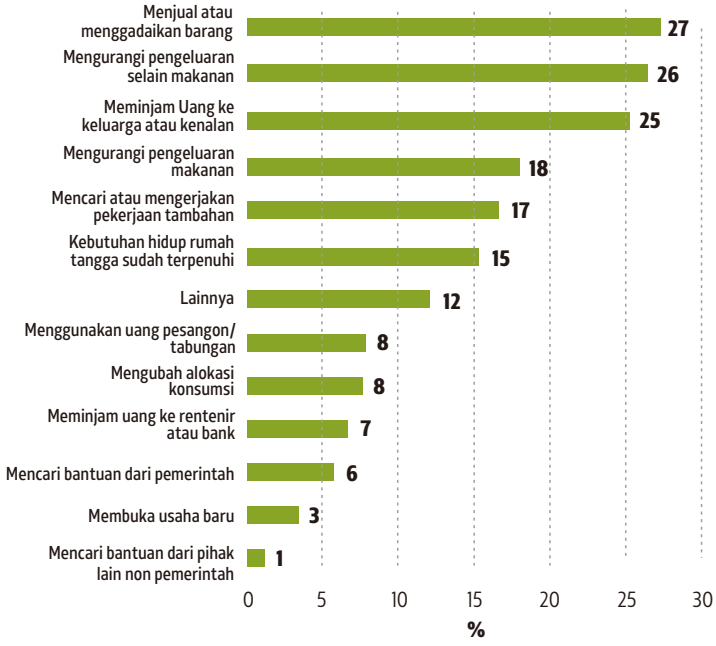

GAMBAR 5 Beberapa *coping mechanism* yang dilakukan dalam mengelola kebutuhan saat krisis.
Sumber: **Survei Rumah Tangga 2020**.

Banyak faktor memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam mengatasi krisis; salah satunya adalah adanya tabungan (berupa uang yang mudah dicairkan) atau barang (yang mudah dijual atau digadaikan). Gambar 6 menunjukkan proporsi kepemilikan tabungan uang atau barang rumah tangga secara nasional. Sebanyak 51% rumah tangga di Indonesia tidak memiliki tabungan uang maupun barang. Sementara itu, 14% rumah tangga memiliki tabungan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga selama lebih dari 6 bulan, 10% memiliki tabungan yang dapat mencukupi kebutuhan selama kurang dari sebulan, dan selebihnya memiliki tabungan yang dapat mencukupi kebutuhan selama 1–6 bulan.

Bantuan Sosial Sebagai Pengurang Beban Pengeluaran

Selain usaha *coping mechanism* dari rumah tangga sendiri, selama 2020 pemerintah juga telah menyalurkan sejumlah program perlindungan sosial baik dalam bentuk subsidi maupun uang tunai atau bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hasil Survei Rumah Tangga 2020 menunjukkan bahwa 85% rumah tangga menerima setidaknya satu program bantuan dari pemerintah. Sementara itu, 95% dari rumah tangga di persentil 20 ke bawah mendapatkan bantuan tersebut.

Empat program besar berupa bantuan tunai, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), BLT Dana Desa (BLT DD), dan Bantuan Sosial Tunai (BST), digunakan untuk memudahkan penghitungan dalam mengukur kecukupan nilai program bantuan. Empat program tersebut mencakup setidaknya 35 juta atau 50% rumah tangga.

Gambar 7 menunjukkan cakupan program bansos dari data Susenas September 2020. Sebanyak 69% rumah tangga termiskin di wilayah perkotaan dan 76% rumah tangga termiskin di wilayah perdesaan menerima setidaknya satu bantuan sosial. Rumah tangga

Foto: Hendrik Arnold Mau

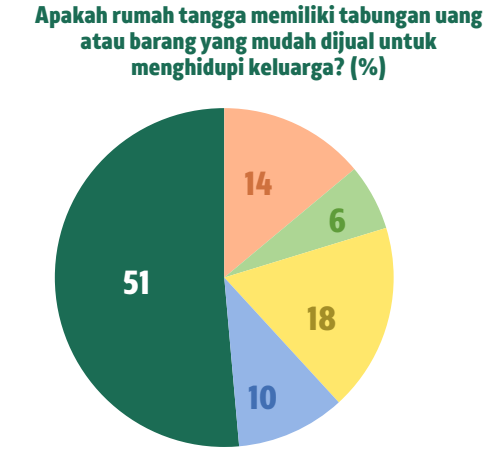

GAMBAR 6 Kepemilikan tabungan atau barang.
Sumber: **Survei Rumah Tangga 2020**

yang lebih miskin memiliki proporsi lebih tinggi sebagai penerima bantuan dibandingkan rumah tangga yang lebih kaya. Pola ini terjadi karena program bansos selama ini memang menarget rumah tangga miskin.

Sementara itu, Gambar 8 menunjukkan rata-rata kecukupan nilai bantuan sosial terhadap pengeluaran rumah tangga berdasarkan peringkat desil pengeluaran rumah tangga pada Maret 2020. Jika empat besar program bansos tunai di atas dikombinasikan, nilai bantuan sosial bernilai sebesar 21% dari total pengeluaran rumah tangga termiskin di wilayah perdesaan dan bernilai sebesar 18% untuk rumah tangga termiskin di wilayah perkotaan. Makin kaya sebuah rumah tangga, relatif makin berkurang proporsi manfaat bantuan sosial yang dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat relatif bansos untuk rumah tangga miskin relatif lebih besar.

Selain itu, dari Survei Rumah Tangga 2020, 67% rumah tangga penerima bantuan secara subjektif menyatakan bahwa bantuan yang mereka terima sangat bermanfaat. Di antara penerima bantuan kombinasi tiga hingga empat program, 80% sampai 86% rumah tangga menyatakan bantuan yang mereka terima sangat bermanfaat.

Tantangan Pemulihan

Dari status terkini (per 15 Juli 2021), kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Menanggapi hal ini, Bank Indonesia bahkan sampai menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2021 dari 4% - 5% menjadi 3,8%. Salah satu langkah utama yang

GAMBAR 7 **Menerima Minimal Satu Program Bantuan Sosial** (PKH/BPNT/BST/BLT DD)
September 2020

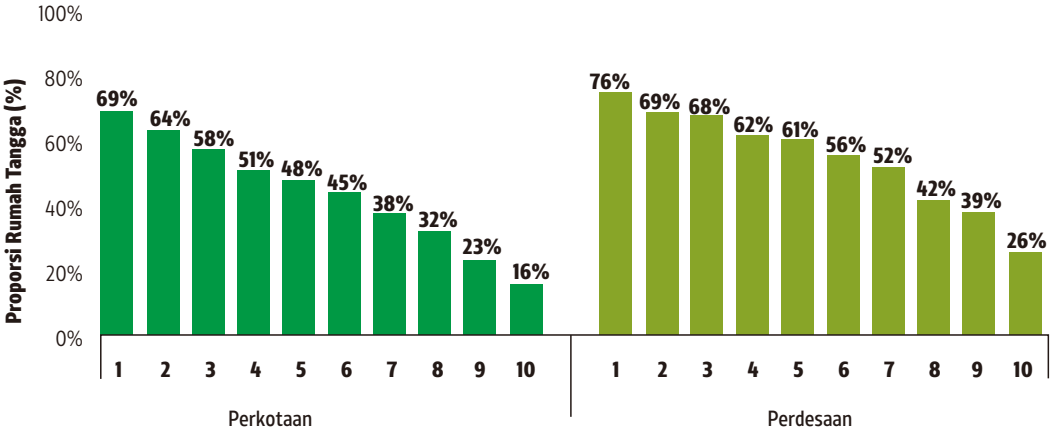

GAMBAR 8 **Rata-Rata Proporsi Nilai Bantuan Sosial terhadap Total Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga**

(Kombinasi PKH/BPNT /SST /BL TOD)
September 2020

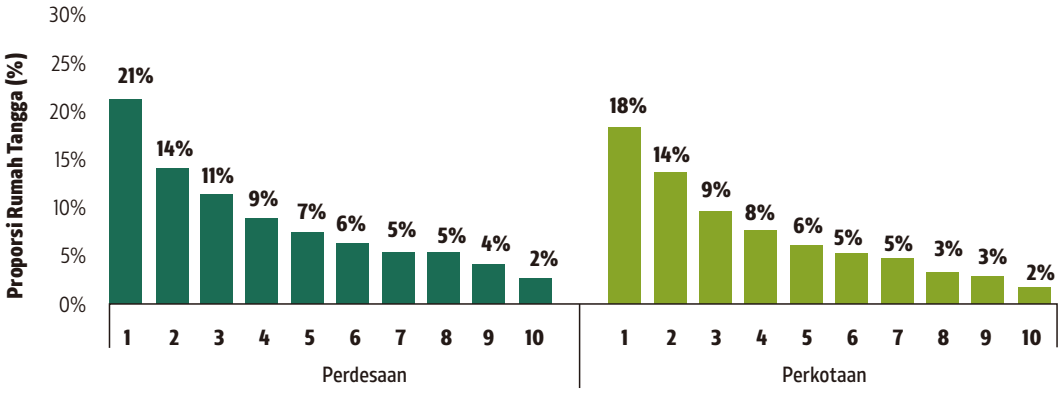

Desil pengeluaran per kapita rumah tangga pada Maret 2020 (1= 10% termiskin, 10=10% terkaya)

harus diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan pandemi adalah mempercepat vaksinasi secara nasional. Selain itu, bantuan sosial masih sangat diperlukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama rumah tangga miskin, dalam situasi krisis saat ini.

Secara sederhana, ada tiga langkah yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial. Pertama, pemerintah bisa memperbesar nilai bantuan. Misalnya, nilai bantuan dapat diperbesar dari rata-rata 300 ribu rupiah per bulan per rumah tangga pada 2020 menjadi 600 ribu rupiah per bulan per rumah tangga pada 2021. Pada 2020, rata-rata nilai bantuan sosial tunai periode April–Juni sebenarnya sudah sebesar 600 ribu rupiah per bulan, tetapi pada periode Juli–Desember nilai bantuan ini turun menjadi 300 ribu rupiah per bulan per rumah tangga. Angka nominal ini dinilai kurang memadai mengingat beban rumah tangga makin berat selama krisis berkepanjangan akibat pandemi. Sebagai perbandingan, rata-rata garis kemiskinan nasional adalah Rp.2.216.714 per rumah tangga miskin per bulan. Untuk menambah nilai bantuan, satu program dapat saling melengkapi atau dikombinasikan dengan program lain untuk memperbesar manfaat program terhadap pengeluaran rumah tangga.

Kedua, pemerintah dapat memperluas cakupan program-program perlindungan sosial yang telah ada, terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin yang belum tercakup bantuan sosial mana pun. Gambar 7 menunjukkan bahwa sekitar 25% - 30% dari 10% rumah tangga termiskin tidak menerima satu program bantuan sosial pun. Angka rumah tangga yang tidak tercakup juga masih cukup besar untuk 40% rumah tangga termiskin. Untuk keperluan ini, perbaikan pangkalan data rumah tangga miskin, rentan miskin, dan yang terdampak pandemi pun menjadi krusial karena pangkalan data yang baik menentukan tepat sasaran dan berhasil atau tidaknya sebuah program.

Ketiga, pemerintah perlu memastikan tersalurkannya program bantuan sosial secara tepat waktu, yakni sebelum dampak krisis menjadi terlalu besar terhadap rumah tangga. Ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran bantuan menjadi kunci efektivitas program dalam menanggulangi penurunan kesejahteraan rumah tangga.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari:
https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi

DESA RAMAH ANAK

Oleh
M. GHUFRAN H. KORDI K.

Kekerasan terhadap anak adalah permasalahan sosial serius yang telah menjadi perhatian nasional sejak sekitar 20 tahun lalu. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) adalah bagian dari kebijakan negara untuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, di mana perubahan tersebut di antaranya adalah dalam rangka melindungi anak dari bentuk kekerasan yang semakin kompleks.

Terakhir adalah perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 ini populer di media sebagai "Perppu Kebiri", karena mengatur hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat (7)).

Kekerasan terhadap anak terjadi di berbagai strata sosial dan lini kehidupan. Keluarga atau lingkungan rumah yang merupakan ruang pertama untuk tumbuh dan berkembangnya anak, kadang menjadi tempat kekerasan

Pelatihan yang dilaksanakan secara daring. Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

terhadap anak, di mana orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat menjadi pelakunya. Rumah kedua anak adalah sekolah, namun di sekolah juga anak tidak terbebas dari kekerasan.

Sementara itu, respons masyarakat tidak selalu positif, karena moral pengasuhan anak yang dianut masyarakat juga tidak selalu ramah anak, bahkan bertentangan dengan moral dan nilai-nilai hak-hak dan perlindungan anak. Ada juga masyarakat yang permisif terhadap kekerasan terhadap anak, atau menganggap permasalahan anak sebagai urusan keluarga atau rumah tangga.

Layanan Terpusat di Kota

Penanganan anak korban kekerasan di Indonesia selama sekitar 20 tahun terakhir sudah cukup maju. UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) yang sebelumnya bernama P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) berperan penting dalam pendampingan dan pemulihan korban. Selain itu, terdapat PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) dan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang aktif melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Ketika sebagian besar masyarakat beraktivitas di dalam rumah, maka anak-anak juga rentan menjadi korban kekerasan fisik, mental, dan seksual secara domestik di dalam rumah dan secara digital di dunia maya.

Namun, lembaga-lembaga layanan tersebut berada di perkotaan. Dengan demikian, jika korban, terutama berada di desa dan pulau-pulau terpencil, membutuhkan layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak, maka pengguna layanan akan mengeluarkan biaya transportasi dan biaya lain yang cukup besar untuk mengakses layanan yang ada di kota. Padahal untuk kasus-kasus tertentu, korban membutuhkan pendampingan dan perlindungan yang menyebabkan korban harus menetap. Ini akan menyebabkan korban dan keluarganya mengeluarkan ongkos yang besar.

Di sisi lain, permasalahan anak yang berkategori ringan yang seharusnya menjadi ranah tokoh masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah desa/kelurahan untuk menyelesaikannya. Tetapi oleh keluarga korban dan pihak tertentu langsung dilaporkan atau dirujuk ke lembaga-lembaga formal. Ini tidak salah namun menggerus dan menghilangkan kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial secara kekeluargaan. Cara-cara yang mengabaikan kebiasaan dan kekuatan masyarakat juga tidak akan membantu perlindungan anak berbasis masyarakat.

Masuknya kasus-kasus ringan di lembaga layanan atau lembaga formal lainnya, justru menambah beban lembaga layanan yang memang sudah kekurangan tenaga dan fasilitas. Apalagi masih banyak lembaga layanan yang ada pun belum mempunyai mekanisme standar dalam penanganan korban. di pihak lain, kasus-kasus ringan yang dilaporkan dan dirujuk ke lembaga layanan akan semakin melemahkan mekanisme masyarakat dalam menyelesaikan masalah, yang berarti semakin memperlemah kohesi sosial.

Keterampilan Pengasuhan untuk Pencegahan

Karena itu, perlu solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut, baik dengan menyiapkan sumber daya yang dekat dengan keluarga dan anak rentan dan berisiko, maupun membangun mekanisme berbasis masyarakat untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak pada tingkat desa, kelurahan, dan komunitas.

Pendekatan berbasis desa, kelurahan, dan komunitas diharapkan dapat membantu mengatasi kekerasan dan eksploitasi anak ketika masyarakat juga diperhadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Pandemi memaksa masyarakat menjadi manusia domestik atau hidup di dalam rumah, sehingga penguatan keluarga dan masyarakat untuk melindungi dan menyelamatkan anak menjadi penting dan strategis. Pasalnya, ketika sebagian besar masyarakat beraktivitas di dalam rumah, maka anak-anak juga rentan menjadi korban kekerasan fisik, mental, dan seksual secara domestik di dalam rumah dan secara digital di dunia maya.

Upaya mengembangkan dan memperkuat layanan kesejahteraan dan perlindungan anak di tingkat masyarakat, desa, dan kelurahan telah dimulai, misalnya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial), *Shelter* Warga, Kelompok Konstituen, dan sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut telah dibentuk di desa dan kelurahan, yang akan berfungsi sebagai lembaga layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.

Namun, untuk menjadikan lembaga-lembaga tersebut berfungsi optimal, maka perlu diperkuat dengan sumber daya atau tenaga, kelembagaan, dan dukungan anggaran yang cukup. Ini menjadi tanggung jawab pihak-pihak berkontribusi dalam memperkuat kelembagaan yang ada. Atas dukungan UNICEF *(United Nations Children's Fund)* melalui Program Penguatan Lingkungan Aman dan Ramah Anak *(Strengthening Safe and Friendly Environment for Children*-SAFE4C*)*, Yayasan BaKTI

melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperkuat kelembagaan perlindungan anak di tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Maros, Gowa, Bulukumba, dan Kota Makassar. Di tengah suasana pandemi COVID-19, maka pelaksanaan kegiatan berlangsung secara *online* atau *daring* (dalam jaringan) dan *offline* atau tatap muka.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan fasilitator masyarakat, adaptasi SOP (Standar Operasional Prosedur) lembaga layanan, pengembangan mekanisme berbasis masyarakat, advokasi dan koordinasi untuk kebijakan dan alokasi anggaran perlindungan anak, serta pelatihan fasilitator anak mengenai kecakapan hidup anak.

Pelatihan Fasilitator Masyarakat tentang Pengasuhan, Pertolongan Pertama Psikologis, dan Pemahaman Kerentanan, serta Identifikasi Anak dan Keluarga Rentan Anak adalah, untuk menghasilkan fasilitator atau relawan di tingkat desa dan kelurahan yang harapannya akan melakukan beberapa hal untuk memperkuat kelembagaan perlindungan anak di tingkat desa dan kelurahan.

Pengasuhan merupakan faktor penting dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Orang tua atau pengasuh yang tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengenai pengasuhan akan menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Pengasuhan adalah pengetahuan dan keterampilan yang dapat diajarkan. Karena itu pelatihan fasilitator masyarakat tentang pengasuhan adalah untuk menyediakan fasilitator di tengah masyarakat yang menjadi pelopor pencegahan kekerasan anak di desa dan kelurahan.

Sedangkan Pelatihan Fasilitator Anak mengenai Kecakapan Hidup Anak dimaksudkan untuk menghasilkan anak sebagai pendidik sebaya, sekaligus sebagai pelopor dan pelapor perlindungan anak di desa dan kelurahan.

Membangun Desa Ramah Anak

Pengembangan mekanisme layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak berbasis masyarakat di desa akan memperkuat kelembagaan perlindungan anak di tingkat desa. Mekanisme berbasis masyarakat akan meningkatkan kepedulian masyarakat dan membangun sistem untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Moral dan nilai-nilai pengasuhan dan pendidikan anak yang menghambat dan merugikan tumbuh kembang anak di masyarakat harus dicegah dan dihentikan. Mekanisme yang dikembangkan harus mengadopsi moral dan nilai-nilai hak dan perlindungan anak yang telah terbukti dan dipercaya melindungi anak, baik yang ada dan berkembang di masyarakat, maupun yang telah diadopsi dalam hukum nasional maupun internasional.

Desa diakui dan diberi kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan bagi kepentingan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Seiring dengan pengakuan dan pemberian kewenangan, desa juga mendapat alokasi anggaran (dana desa) dari pusat untuk membiayai pembangunan desa, termasuk perbaikan pelayanan publik di desa. Layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak berbasis masyarakat di desa adalah pelayanan publik yang perlu menjadi bagian dari perencanaan dan pembangunan desa.

Melalui kewenangan desa, pemerintah dan masyarakat desa dapat membangun "Desa Ramah Anak" yaitu desa yang mempunyai perangkat dan mekanisme layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Dalam proses perencanaan dan penganggaran desa, pemerintah dan masyarakat melibatkan anak sebagai *stakeholders*. Proses-proses dan mekanisme untuk menjadikan "Desa Ramah Anak" harus diatur dalam instrumen yang mengikat semua pihak dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

Beberapa Desa telah membuat Perdes Perlindungan Anak, Perdes Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dan Perdes Pencegahan Perkawinan Anak. Ini adalah langkah maju yang perlu diapresiasi dan direplikasi. Upaya-upaya positif perlu disambut dan didukung untuk pencegahan kekerasan terhadap dan kepentingan terbaik bagi anak.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program Kerja Sama Unicef - BaKTI dapat menghubungi **info@bakti.or.id**

Foto: Dok. Zulkhaidir Purwanto

MENGHIDUPKAN KEBIASAAN BERKOMPOS DI KOTA DAENG

Oleh **SHERLY HEUMASSE**

Menjadi salah satu peserta program *Indonesian Young Leaders Programme* (INSPIRASI) tahun 2019 di New Zealand adalah suatu kebanggaan tersendiri yang dirasakan oleh Zulkhaidir Purwanto yang akrab disapa Zul. Selama 6 bulan berada di sana, banyak pengetahuan dan hal baru yang diperoleh dan tentunya memberi faedah baginya maupun organisasi di mana ia bergiat, *Wasteducation* Makassar. Salah satunya yakni kesempatan kunjungan belajar ke *Sustainability Center of Waiheke Resource Trust* (WRT) yang berlokasi di Waiheke Island, New Zealand.

WRT sendiri adalah sebuah lembaga non-profit yang bekerja untuk memulihkan lingkungan, melindungi sumber daya alam dan

membangun ketahanan dalam masyarakat untuk masa depan yang berkelanjutan. WRT mengerjakan berbagai proyek dengan tujuan untuk membangun komunitas yang tangguh dan berkelanjutan dan bekerja dengan individu, rumah tangga, bisnis, sekolah, dan kelompok masyarakat. Proyek tersebut diantaranya *Compost Collective* yakni mengurangi sampah ke TPA dan membangun tanah yang sehat dengan menawarkan pendidikan dan sarana pengomposan rumah gratis; dan The Compost Co., mengumpulkan sisa makanan dan kemasan dari bisnis lokal dan mengubahnya menjadi kompos bernutrisi untuk tanah dan produktif untuk lahan bercocok tanam.

Dalam kesempatan tersebut, Zul mengunjungi WRT sebanyak 2 kali, bersama grup peserta INSPIRASI dan kunjungan secara individu. Ketika kunjungan individu inilah muncul ide untuk mengembangkan sebuah proyek terapan mengenai pengelolaan sampah setelah kembali ke Indonesia. Di sana ia bertemu seorang mentor, Kristin Busher dan banyak belajar tentang proses pengomposan *(composting)* bahkan ikut bekerja mengaduk dan mereduksi ukuran sampah bongkahan menjadi ukuran yang lebih kecil.

Proposal proyek terapannya lalu disiapkan dengan bantuan teknis para mentor di New Zealand. Ketika melakukan *review* literatur untuk proposalnya, Zul menemukan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Februari 2019 bahwa 60% sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia adalah sampah organik. Kondisi ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan Selandia Baru di mana sebagian besar adalah sampah konstruksi. Inilah yang menjadi ide awal proyeknya yang berfokus pada pengelolaan sampah organik dengan sistem *thermal composting/anaerobic composting. Anaerobic composting* adalah suatu sistem pengomposan sampah organik yang disimpan dalam suatu wadah kedap udara. Cara bekerja *anaerobic composting* cukup sederhana dengan menguraikan sampah tanpa oksigen di mana bahan organik ditumpuk dan terurai secara alami. Proses ini tidak memerlukan jenis perawatan apapun. Proyek terapannya ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah organik yang dibuang ke TPA dengan melatih masyarakat lokal dalam pengomposan organik dan mengembangkan dasar untuk usaha sosial pengomposan.

Rencana awal yang akan dibuat adalah *community composting* di salah satu Universitas di Makassar dan melibatkan mahasiswa Fakultas Pertanian sebagai relawan. Tetapi ide ini kemudian berganti dengan *composting* berbasis rumah tangga karena situasi pandemi COVID-19 sehingga perlu beradaptasi dengan kondisi yang sulit untuk mengumpulkan orang.

Untuk lebih memperkuat hasil tinjauan pustaka mengenai sampah organik dan mengetahui bagaimana pengolahan sampah yang dilakukan oleh setiap rumah tangga dan pendekatan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Zul mengumpulkan pendapat masyarakat/ibu rumah tangga melalui proses *co-design* yang ia pelajari saat belajar di program INSPIRASI di Auckland, New Zealand. Proses *co-design* ini dimulai dengan mengidentifikasi 10 orang perempuan dari berbagai latar belakang seperti dosen, pegiat usaha katering, karyawan, dan ibu rumah tangga untuk diwawancarai sebagai responden. Wawancaranya sendiri dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang menjadi relawan. Ada enam pertanyaan yang ditanyakan yakni di antaranya berapa banyak sampah yang dihasilkan dalam seminggu, apakah pernah melakukan pengomposan sebelumnya, bagaimana cara mengelola sampah organik tersebut, dan apakah mereka tertarik untuk mencoba pengomposan di rumah.

Ibu Nani, pegiat usaha catering makanan mengungkapkan "Saya menghasilkan minimal 5 ember atau satu ember 60 liter sampah organik dan 1 ember sampah anorganik dalam seminggu. saya ingin melakukan pengomposan tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya. Biasanya sampah disimpan dalam ember tertutup rapat dan dibuang ke truk sampah setiap 2 hari".

Adapun responden lain, seorang ibu rumah tangga mengatakan bahwa ia menghasilkan sampah 2-3 ember dalam seminggu. Ia tidak pernah melakukan pengomposan namun tertarik melakukannya tetapi tidak tahu caranya.

Sebagian besar sampah adalah sisa sayuran, buah-buahan, dan daun kering yang tidak terpakai karena ia memiliki tanaman rambutan di halaman rumahnya. Selama ini sampah organik hanya ditaruh di tempat sampah dan diangkut oleh truk sampah. Ia menanam sayuran di rumahnya tetapi tidak menggunakan pupuk kompos.

Dari hasil wawancara menggunakan metode *co-design* ini, Zul dan tim menyimpulkan bahwa hampir semua responden tidak mengetahui bagaimana cara mengolah sampah organik sendiri sehingga ide pengomposan layak untuk dilakukan. Selain itu, ide ini cukup inovatif karena belum ada yang melakukannya di Makassar untuk skala rumah tangga.

Zul juga terinspirasi dari komposter milik keluarga tempat ia tinggal selama menjalani program di Auckland, dan akhirnya membuat Prototipe komposter yang mirip dan disesuaikan dengan alat yang tersedia di tempat tinggalnya. Komposter termal ini menggunakan drum bekas dengan kapasitas 160 liter. Berbekal pengetahuan yang diperoleh dari New Zealand dan bantuan dari Youtube akhirnya komposter selesai dikerjakan pada akhir bulan Mei 2021.

Tanggal 27 Juli 2021 lalu, BaKTI melakukan kunjungan observasi untuk melihat *prototype* komposter tersebut dan sejauh mana proyek ini berjalan. Hasil observasi, komposter tersebut bekerja dengan baik dan sudah terisi penuh dengan sampah organik. Bahkan sudah menghasilkan pupuk cair. Sedangkan pupuk kompos padat baru akan dipanen pada akhir Agustus. Dibutuhkan kurang lebih 3 bulan untuk dapat menghasilkan pupuk kompos padat ini. Berbicara mengenai komposisi, sampah yang baik untuk komposter jenis ini idealnya berisi 70% sampah 'hijau' misalnya ampas kopi dan sayuran/kulit buah yang tidak terpakai, dan 30% berisi sampah 'coklat' seperti ampas gergaji dan daun kering yang mengandung karbon dan berguna mengurangi bau dari sampah organik sehingga kualitas kompos juga baik.

Dukungan dan partisipasi masyarakat

Selain membuat *prototype* komposter, Zul juga berharap akan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan pengomposan ini khususnya dalam pengumpulan sampah *organic*. Setelah proses wawancara selesai, ada beberapa rumah tangga yang membantu proses pengumpulan sampah tersebut. Sayangnya volume sampah dari rumah tangga sangat kecil.

Untuk mengatasi masalah volume ini dan proses pengomposan bisa lebih cepat selain dari rumah tangga, Zul melakukan pendekatan ke enam pegiat usaha dalam kegiatan

Foto-foto: **Dok. Zulkhaidir Purwanto**

pengomposan ini sebagai mitra. Dua produsen furnitur untuk mendapatkan ampas gergajinya yang terbuang percuma karena mereka tidak mengetahui cara memanfaatkannya, dua Cafe untuk mengambil sisa ampas kopi, satu penjual pisang molen untuk mendapatkan kulit pisang dan satu penjual coto untuk sampah kulit jeruk nipis dan bungkus ketupat.

Cukup mudah baginya untuk mendekati dan mengumpulkan sampah tersebut karena ia menjadi salah satu pelanggan mereka. Menurutnya, akan terasa sulit bekerja sama dengan orang yang benar-benar baru karena mereka enggan menanggapi dan banyak bertanya. Selain itu, rasanya seperti menambah pekerjaan mereka dengan memilah sampah. Selama ini sampah-sampah sisa tersebut ditumpuk dalam satu ember atau kantong sampah dan langsung dibuang ke truk sampah.

Tantangan dan rencana ke depan

Memulai proyek ini tentu saja ada tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah pegiat usaha yang menjadi mitranya ogah-ogahan untuk memilah sampah organiknya. Untuk menyiasati hal ini, atas masukan dari BaKTI, Zul memberikan apresiasi kepada mereka berupa pupuk cair dari hasil proses pengomposan. Strategi ini cukup berhasil. Walau sederhana, Ibu pegiat usaha pisang molen yang menerima apresiasi kecil ini sangat senang dan bersemangat untuk mengumpulkan dan memilah sampah organiknya.

Tantangan lain adalah terbatasnya personil di lembaga *Wasteducation* sehingga berdampak pada pengumpulan sampah yang memakan waktu lama. Terpikirkan kembali olehnya untuk mendekati Universitas yang sama dan mengajak lagi mahasiswanya terlibat apabila kondisi sudah membaik dari COVID-19.

Bagaimana keberlanjutannya proyek ini? Zul berharap kegiatan *composting* ini bisa berlanjut menjadi sebuah usaha sosial, khususnya untuk pembuatan peralatan komposter skala rumah tangga. Dengan target pasar adalah sekolah, ia berencana untuk mendekati Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk diajak bekerja sama. Selain itu, ia ingin menyasar hotel-hotel dan kafe-kafe besar di Makassar yang ingin mengelola sampah organiknya sendiri. Semoga apa yang telah dikerjakan Zul untuk pengelolaan sampah organik berkelanjutan melalui pengomposan anaerob ini, sekecil apapun itu, sudah menyelamatkan lingkungan kita!

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program Kerja Sama Yayasan BaKTI -UnionAID, dapat menghubungi **info@bakti.or.id**

PERUBAHAN IKLIM ANCAM LUKISAN PURBA DI SULAWESI?

Oleh **EKO RUSDIANTO**

Lukisan purba terancam hilang. Mulai terlihat bercak putih, dan pengelupasan lukisan bak petaka di depan mata.

"Kita tak bisa menghentikan kerusakan lukisan ini. Hanya berusaha memperlambatnya," kata Rustan, arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan.

Selama empat tahun, BPCB membentuk tim restrukturisasi data dan identifikasi, pemantauan laju kerusakan lukisan dinding gua prasejarah. Mereka menentukan mengukur suhu, angin, ph air, hingga identifikasi tanaman di sekitaran mulut gua.

Melalui dokumentasi gambar pun, mereka menentukan titik pemotretan yang tiap periode dilaksanakan di tempat sama. Dua tahun terakhir, saya selalu menyaksikan tim ini bekerja.

Pada hasil sementara, Rustan, memperlihatkan dua foto laju pengelupasan lukisan di dinding Gua (Leang) Jarie, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pada 25 November 2018, tim BPCB memotret pengelupasan di salah satu panel gua. Dua tahun berikutnya, 31 Agustus 2020, foto sama memperlihatkan pengelupasan sangat besar melebihi ukuran pengelupasan sebelumnya.

"Di Jarie, titik yang paling signifikan perubahannya, pengelupasan bertambah lebih 100%," kata Rustan.

Dalam publikasi di jurnal Nature, 13 Mei 2021, dalam *The effects of climate change on the Pleistocene rock art of Sulawesi*, perubahan iklim dan kenaikan suhu membuat lukisan prasejarah di pegunungan kapur ini menjadi rentan rusak dan sangat mengkhawatirkan. Laporan itu menganalisis 11 gua prasejarah di Maros-Pangkep.

Lukisan figur babi yang saling berhadapan dalam kondisi terkelupas di satu dinding Leang Tedongnge.
Sumber: **Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia**

Proses pengelupasan di kanvas seni gua itu memburuk dalam beberapa dekade terakhir. Selanjutnya, para peneliti dalam publikasi itu meyakini pengelupasan itu dipercepat dengan peningkatan suhu lingkungan dan makin sering dan panjangnya fenomena El-Nino di Sulawesi.

Laporan itu juga menyebutkan dari 11 panel seni cadas yang diteliti, terdapat kelimpahan mineral belerang. Namun, pemanasan global membawa dampak buruk di kawasan tempat seni cadas dan membuat El-Nino makin panjang, akhirnya jadikan proses kristalisasi garam makin cepat. "Percepatan kerusakan seni cadas itu, sangat cepat pada 40 terakhir," tulis laporan itu.

Seni cadas di kawasan karst Maros–Pangkep yang dalam laporan BPCB Sulawesi Selatan mencapai situs 300 gua, memiliki gambar berwarna merah dan hitam, berupa lukisan tangan, mamalia, hingga penggambaran manusia. Lukisan-lukisan tua ini kemudian pada periode 40.000-an tahun lalu dinyatakan sebagai ledakan kognitif-ledakan pengetahuan manusia.

Apa benar kerusakan dan pengelupasan begitu besar dipengaruhi suhu iklim saat ini? Sementara pada masa lalu, katanya, fluktuasi iklim secara ekstrim juga terjadi. Pada 800.000 tahun lalu, ada periode glasiasi, yang penumpukan es di kutub. Lalu berlanjut pada 700.000 tahun lalu.

Pada periode kedua ini, Sulawesi Selatan membentuk daratan. Di mana pada bagian tengah menjadi satu daratan, yang sebelumnya dipisahkan laut, antara Pare-pare (saat ini) dan Kabupaten Wajo-saat ini. Bahkan periode ini, Sulawesi Selatan yang saat ini dikenal menjadi dua pulau sendiri, antara Timur dan Barat.

Berikutnya periode glasiasi terakhir terjadi antara 40.000–30.000 hingga 17.000 tahun lalu.

Pada periode ini terjadi penurunan muka laut drastis secara global hingga 125 meter dari muka laut saat ini. Wilayah Indonesia saat ini pun terpengaruh.

Dalam periode zaman es ini, manusia pendukung kebudayaan yang membuat lukisan gua sudah ada. Penanggalan di Gua Biku wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sudah mencapai 45.500 tahun lalu.

"Nah, bagaimana kita mengetahui kerusakan yang terjadi masa itu, jika dibandingkan dengan sekarang. Sampai kita menarik kesimpulan, bahwa sangat cepat sekarang. Kalau melihat data itu kan sejak dulu dan menjadi siklus," kata Rustan.

"Jadi, saya sampai sekarang, tidak menolak kalau ada pemanasan global, tapi menjadi tahap yang wajar. Apakah kita sedang menuju, inter-glasiasi puncak (zaman pencairan es). Atau kita menuju inter-glasiasi yang ekstrem."

Bagi Rustan, kerusakan lukisan-lukisan purba di gua-gua kawasan Maros-Pangkep, sudah terjadi sejak pembuatan lukisan itu selesai. "Apakah kerusakan itu seperti deret hitung hingga sekarang. Ataukah seperti deret ukur yang berfluktuasi. Siapa yang bisa menjamin jika kerusakan itu terjadi per 1.000 tahun, atau per 100 tahun, atau per puluhan tahun. Kami belum sampai pada penelitian itu," katanya.

"Bahwa lukisan itu bertahan hingga puluhan ribu tahun, adalah sebuah kejutan dan sangat mewah."

Faktor pengendapan garam

Penelitian lukisan gua itu pertama kali dilakukan para arkeolog tahun 1950 dan baru menjadi perbincangan. Sebelumnya, naturalis Inggris yang mendatangi kawasan karst 1856, tak menyinggung mengenai gua dengan lukisan purba, meskipun tak menutup kemungkinan dalam rentang tiga bulan, dia memasuki mulut gua. Pengelana lain adalah Paul dan Fritz Sarasin, kebangsaan Swiss 1900-an awal, juga tak menyinggung lukisan gua.

Kini, para arkeolog khusus di Sulawesi Selatan, saban waktu melihat karya purba itu, berusaha menemukan solusi tepat agar lukisan bertahan. Sementara media lukis itu adalah batuan karst atau gamping yang memiliki sifat dan sistem sendiri.

Batuan berpori, seperti busa dapat menarik, menyimpan dan mengalirkan air. Sifat batuan kapur juga terbentuk dari dasar lautan, memiliki garam sendiri–garam geologi. Karena permukaan

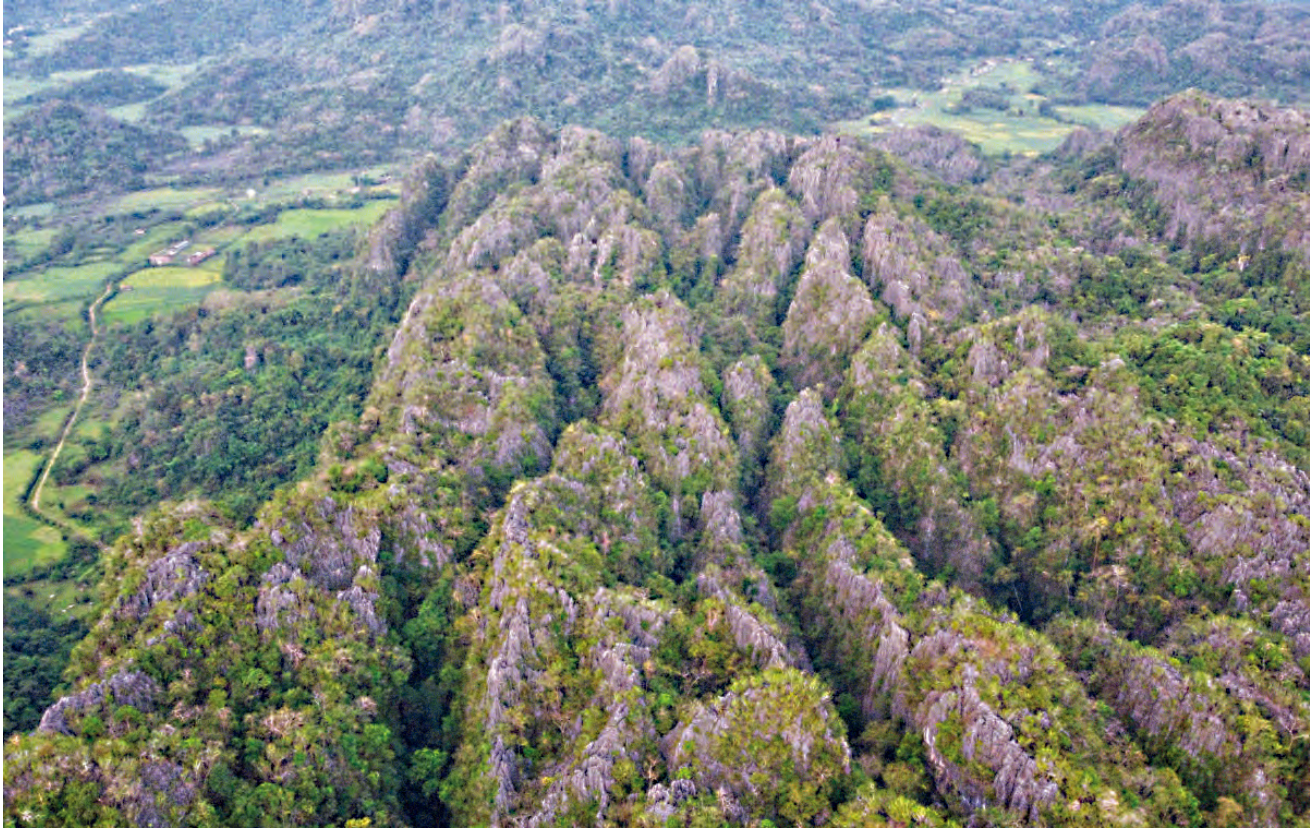

(kiri) Lukisan cap tangan (rock art) di Leang Jarie, dengan ujung jari runcing. Di situs ini lukisan cap tangan berusia 39.400 tahun lalu. Foto: **Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia**
(kanan) Foto drone bentangan kawasan karst di Maros-Pangkep. Foto : **Rais**.

gamping berpori, membuat kapilarisasi–proses naik turun permukaan zat dalam satu wadah.

Batuan gamping yang memiliki pori jadikan proses ini terjadi dan sangat genting dalam pertahanan lukisan purba itu. Gambarannya serupa lentera dengan sumbu minyak, saat sumbu terbakar saat sumbu yang menjadi penghantar minyak hanya terlihat basah, tetapi tak kasat mata, cairan yang bergerak tak pernah terlihat.

Proses kapilarisasi inilah, yang terjadi di batuan karst. Saat kemarau, batuan yang terpapar matahari menjadi kering, dan menarik air dari berbagai titik terdekat. Air-air yang bergerak dari bawah atau titik tertentu menghantar cairan garam, kemudian saat menemukan pelepasan sisa garam akan mengendap (kristalisasi) karena tekanan suhu luar.

Kalau jalur air itu berada di lukisan gua, akan sangat bermasalah. Kalau pigmen atau cat lukisan rapat dan padat, akan jadi selubung mineral. Lukisan itu akan menjadi perangkap dan garam tertinggal di balik cat lukisan.

Proses pengendapan garam yang berlangsung terus menerus dan dipengaruhi cuaca sekitar karst bisa jadikan proses ini terus bergerak. Kalau Musim hujan, aliran mineral air kembali lagi, ketika musim kemarau gumpalan endapan akan bertambah. Akhirnya, mendorong lukisan terkelupas.

Kalau menelisik melalui endapan garam dalam sifat batuan karst, maka pengelupasan lukisan banyak terjadi saat musim kemarau. Sifat inilah yang tak bisa dihentikan. "Seandainya garam itu tidak dinamis, diam saja, tidak akan merusak. Gamping ini hidup. Peka pada aliran-aliran air," kata Rustan.

Faktor lain

Penguapan di sekitar wilayah gua tempat lukisan purba menjadi salah satu risiko. Dalam laporan kegiatan restrukturisasi data dan identifikasi, pemantauan laju kerusakan lukisan dinding gua prasejarah: Kabupaten Maros, Pangkajene Kepulauan, Muna, dan Konawe Utara, BPCB Sulawesi Selatan, proses ini ditengarai dapat membawa garam.

Genangan air atau pembukaan lahan di sekitar kawasan karst harus diminimalisir.

Pengelupasan (tanda lingkaran) lukisan purna di gua.
Foto: **BPCB Sulawesi Selatan**

Genangan-genangan terpapar matahari akan jadikan proses penguapan cepat, kemudian mineral akan dihantarkan angin ke berbagai tempat, termasuk pada dinding gua. Tak ada yang dapat memastikan uap air itu tak membawa mineral garam.

Asumsi inilah yang menjadikan tim di BPCB Sulawesi Selatan, mencari cara menghambatnya. Menghentikan proses alamiah itu, katanya, tidak mungkin. Tim pun mencoba mempertahankan pohon dan akan menanam pohon di depan mulut gua. "Kalau misalkan ada 100 mg garam terbawa oleh uap air, setelah banyak pohon mungkin 20 mg garam bisa tertahan. Itu asumsi kami untuk saat ini. Jadi, kalau ada risiko 10 dan 100, dan harus memilihnya. Kami akan mengambil resiko 10 itu," kata Rustan.

Fakta lain, lukisan di Leang Parewe di Pangkajene Kepulauan, mulut gua berhadapan langsung dengan empang masyarakat yang berdekatan dengan laut. Ketika musim kemarau, petakan empang itu akan beralih fungsi jadi ladang garam.

Bagaimana lukisannya? Dalam monitoring BPCB Sulawesi Selatan, kerusakan tak begitu massif meskipun pengelupasan terjadi. Dibandingkan Leang Jarie, yang berada puluhan kilometer dari laut, dan mulut gua masih tertutup karena banyak pohon.

Meski kemudian data lain menyebutkan, kalau rentang 1990 sampai awal 2000, di depan Leang Jarie warga membuat kandang ayam petelur.

"Empat tahun ini, benar-benar BPCB hanya *monitoring* dan *database* kerusakan. Kita belum menemukan metode yang tepat. Jika sudah terjadi kerusakan dan pengelupasan, iya itu kami sudah menemukannya."

"Apakah kerusakan itu terjadi pada empat tahun terakhir, atau jauh sebelumnya? Atau akumulasi dari ribuan tahun lalu. Saat ini, kita masih membutuhkan sampel dan metode tepat untuk melihatnya."

Untuk mengetahui bagaimana lukisan ini rusak, para arkeolog juga berusaha menyingkap bagaimana pembuatan lukisan ini. Selama ini, para peneliti menyepakati kalau proses dilakukan dengan persiapan matang. Mulai memilih bahan oker–tanah-yang tepat, kemudian dihaluskan, lalu dicampur dengan mineral tertentu.

Tak ada yang dapat memastikan, perekat bahan oker tanah dengan cairan itu lalu kemudian disapukan menjadi sebuah lukisan.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Artikel bersumber dari: **https://www.mongabay.co.id/2021/09/07/perubahan-iklim-ancam-lukisan-purba-di-sulawesi/**

KOBARAN SEMANGAT DI KELAS AKSI

Oleh **Syaifullah**

Lima orang pria terlihat duduk di lantai kayu berlapis karpet plastik. Mereka tampak serius memandangi sebuah handphone yang terhubung ke pelantang. Di tangan mereka ada kertas-kertas putih dan alat tulis. Mereka adalah kader kampung dan perangkat kampung dari Kampung Buetkar, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Mereka sedang khidmat mengikuti pelatihan daring Kelas AKSI yang diadakan KOMPAK-BaKTI bekerja sama dengan Seknas FITRA dan pemerintah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, serta Kedutaan Besar Australia.

Kelas AKSI adalah nama yang diberikan untuk pelatihan bagi kader dan perangkat kampung di lokasi implementasi program dukungan KOMPAK-LANDASAN di Papua dan Papua Barat. Pelatihan ini dikhususkan pada materi akuntabilitas sosial, yang terdiri dari transparansi anggaran dan pembangunan kampung serta pendidikan dasar-dasar jurnalistik untuk kader dan perangkat kampung. Akademi Kampung Sinergi (AKSI) merupakan akademi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan kader di kampung, kelurahan dan distrik dalam berbagai aspek. Tempat belajar ini dapat dilakukan secara daring maupun luring dengan mengangkat berbagai tema seperti transparansi anggaran, jurnalisme, adminduk, kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal dan lain-lain. Dalam pelaksanaan selanjutnya, AKSI akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait melalui koridor PROSPPEK OTSUS. Pada kelas awal AKSI, tema yang diangkat adalah: Transparansi Kampung.

Pelaksanaan Kelas AKSI akhirnya memang diadakan secara daring karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan luring atau tatap muka langsung. Setiap minggu ada dua hari pertemuan, sekali pertemuan waktu dibatasi maksimal tiga jam. Kelas ini total dilaksanakan dalam 10 hari pertemuan yang dibagi ke dalam lima minggu.

Tantangan Kelas Daring

Membuat kelas secara daring memang sudah jamak selama masa pandemi, namun untuk Papua dan Papua Barat, ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Infrastruktur internet di Papua dan Papua Barat tidak merata, apalagi peserta sebagian besar tinggal di kampung dan biasanya tidak ada jaminan jaringan internet akan stabil sepanjang hari.

Tantangan lainnya adalah memastikan materi yang dibawakan bisa diserap oleh peserta. Membawakan materi dengan cara tatap muka saja, kita tidak bisa memastikan 100% peserta akan konsentrasi selama pelatihan, apalagi di pelatihan daring. Itu juga yang jadi alasan kenapa kelas dibatasi maksimal hanya tiga jam per hari. Tentu dengan pertimbangan untuk memastikan peserta tetap fokus.

Seknas FITRA sebagai penanggung jawab materi transparansi kampung dan tim BaKTI sebagai penanggung jawab materi jurnalisme kampung melakukan beberapa modifikasi pada modul dan materi yang dibawakan. Modul tentu disesuaikan dengan kondisi dan infrastruktur yang benar-benar menjadi tantangan. Intinya, jangan sampai peserta bosan dan malah tidak bisa menyerap materi.

Tanggal 24 Agustus 2021, kelas pertama digelar. John Theodore Weohau sebagai direktur implementasi KOMPAK, dan Legius Wanimbo sebagai perwakilan Provinsi Papua Barat membuka secara resmi kegiatan ini.

Waktu tra cukup!

"Maaf ibu, kita sinyal susah ini. Jadi keluar-masuk," kata salah satu peserta di kolom chat aplikasi Zoom. Peserta lainnya mengeluhkan listrik yang tiba-tiba mati di tempatnya. Ada juga yang mengeluh, sinyal tiba-tiba hilang. Itu adalah beberapa tantangan yang muncul ketika kelas digelar.

Namun itu semua tidak mengurangi semangat peserta untuk tetap aktif selama pelatihan. Di setiap sesi diskusi ataupun sesi tanya-jawab, selalu ada banyak peserta yang seperti berebutan ingin memberi pendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan.

"Saya salut dengan para peserta Kelas AKSI, meski di tengah keterbatasan fasilitas mereka sangat antusias mengikuti kegiatan," kata Badiul Hadi dari Seknas FITRA. Badiul Hadi juga membawakan beberapa materi terkait akuntabilitas sosial dalam pelatihan ini. Dia melihat sendiri bagaimana peserta sangat antusias mengikuti pelatihan di tengah berbagai keterbatasan yang mereka hadapi.

Sesi diskusi yang membagi peserta ke dalam beberapa grup kecil, suasana selalu ramai. Para peserta seperti tidak sabar untuk ikut memberikan pendapat, bahkan waktu diskusi yang dibatasi hanya satu jam seperti tidak cukup.

"Waktu su habis, baru tong masih diskusi," kata peserta sambil memprotes waktu yang dirasanya sangat singkat. Itu sebagai bukti saja kalau mereka masih sangat antusias.

Tidak jarang juga, waktu yang hanya dibatasi maksimal pukul 13:00 WIT harus diulur karena kelas masih ramai. Ini tentu sangat menggembirakan mengingat kekhawatiran panitia di awal terkait tantangan infrastruktur internet dan masih kurangnya pengalaman membuat kelas daring.

Antusiasme peserta itu juga diakui oleh Lasmaria Sihombing, jurnalis dan *copywriter* yang membawakan materi tentang memberikan judul dan keterangan foto dengan dasar-dasar jurnalistik.

"Kelasnya menarik dan seru. Pesertanya juga responsif, mau bertanya dan mau memberikan contoh-contoh liputan foto berita dan judul berita yang mereka miliki," kata Lasmaria.

Pelatihannya Menarik

Selama pelatihan berjalan, antusiasme memang terasa dari para peserta. Hingga minggu ketiga atau pertemuan keenam setidaknya ada 60-an lebih peserta yang tercatat mengikuti pelatihan. Sebagian memang mengikutinya sendiri-sendiri menggunakan perangkat seperti laptop maupun *handphone*. Namun sebagian juga berkumpul di satu tempat, seperti yang dilakukan peserta di Kampung Buetkar, Asmat dan kampung Marsi, Kaimana, Papua Barat.

Dari respons peserta menurut *polling* yang diberikan, 64,8% peserta mengaku mereka senang mengikuti pelatihan ini karena ini memang ilmu yang mereka butuhkan. Sementara itu 14,8% peserta mengaku sangat bersemangat mengikuti pelatihan namun terkendala internet yang memang lambat dan lumayan mempersulit mereka.

Materi yang menurut mereka menarik dan memang dibutuhkan itu membuat 74,1% peserta akan mengajak rekan mereka di kampung untuk

mengikuti kelas yang sama bila di kemudian hari akan dilaksanakan lagi. Ada 18,5% lainnya yang mengatakan mungkin akan mengajak rekan mereka yang lain di kampung.

"Pelatihannya berguna sekali untuk kita kader kampung ini, bisa membantu pekerjaan kita di kampung," Kata Sakni Falden, salah satu peserta pelatihan dari Kampung Tanama, Fakfak, Papua Barat. Sehari-harinya, Sakni adalah kader kampung dan dia mengaku mengikuti pelatihan bersama tiga orang temannya di kantor desa.

Sakni mengakui pelatihan ini beserta seluruh materi yang didapatkan sangat membantunya dalam menjalankan pekerjaan sebagai kader kampung. Namun, dia juga menyayangkan waktu pelatihan yang sempit. Sakni berharap di lain waktu akan ada pelatihan yang sama yang diperuntukkan bagi mereka, kader kampung di Papua dan Papua Barat.

Sebuah Pengalaman Baru

Meski awalnya sempat ragu mengingat ini untuk pertama kalinya pelatihan diadakan secara daring dengan peserta dari Papua dan Papua Barat, namun ternyata semua terbukti tetap bisa berjalan dengan baik. Tantangan infrastruktur memang membuat beberapa peserta cukup kesulitan, tapi semangat mereka bisa mengalahkan rintangan itu.

"Pelatihan ini di luar kebiasaan kita, tapi ternyata sangat luar biasa dan bisa dilakukan di tanah Papua," kata Dewi Malik, perwakilan dari KOMPAK yang sekaligus menjadi "kepala sekolah" untuk Kelas AKSI.

Badiul Hadi dari Seknas FITRA juga memberi tanggapannya, "Ini tentu juga menjadi pengalaman baru bagi para peserta Kelas AKSI, ketika pelatihan diadakan secara online. Semoga tidak mengurangi semangat mereka, dan pengetahuan yang didapat bisa bermanfaat dalam mewujudkan peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan kampung, meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pelayanan pemerintahan kampung-termasuk Bamuskam-untuk kesejahteraan warga kampung," katanya.

Pelatihan daring memang jadi salah satu pilihan di masa pandemi ini ketika pertemuan tatap muka dibatasi. Kelas AKSI yang akan berjalan sampai akhir bulan September 2021 ini membuktikan bahwa kelas daring juga tetap bisa dilakukan di tanah Papua. Tentu dengan penyesuaian modul dan waktu dengan memperhitungkan tantangan infrastruktur internet tanah Papua yang tidak sebagus daerah Jawa atau Sulawesi, misalnya.

Semangat para kader kampung dan perangkat kampung di tanah Papua cukup bisa mengimbangi tantangan infrastruktur tersebut. Semangat mereka tentu menjadi semangat untuk mendorong pembangunan kampung di tanah Papua lebih baik lagi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi **info@bakti.or.id**

Foto: **Dok. Vestanesia**

GOTONG ROYONG PERTANIAN UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA

Oleh **ITA IBNU**

Pertanian merupakan sektor penting yang menopang berlangsungnya peradaban manusia di mana pun, termasuk di Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, yang sebagian besar penduduknya menggantungkan diri pada sektor pertanian. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia pun ditopang oleh sektor pertanian.

Namun pembangunan pertanian di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, diantaranya kesejahteraan petani, struktur usia tenaga kerja pertanian didominasi penduduk berusia 60 tahun ke atas dengan jumlah generasi muda yang beraktivitas di pertanian masih sedikit bahkan diproyeksikan akan terus menurun sedangkan petani berusia lanjut terus akan meningkat atau dengan kata lain regenerasi SDM yang tidak berjalan dengan baik. Minat dan partisipasi generasi muda dalam bidang pertanian terus menurun. Tantangan lainnya adalah pertanian dianggap tidak mampu menopang masa depan, akses lahan dan modal yang terbatas, tak jarang membuat petani terjebak dalam siklus kemiskinan, petani hanya mampu mengelola hasil panen sebelumnya dan terus bergulir. Selain itu akses pasar yang terbatas, seringkali dipermainkan oleh tengkulak yang membeli hasil panen dengan harga rendah. Ditambah, pada umumnya petani melakukan usahanya secara individual dan skala kecil, takut berinovasi dan mencoba hal-hal baru, menerapkan tekhnologi baru. Padahal sektor pertanian punya potensi besar, jika dikelola dengan baik dengan memanfaatkan tekhnologi terutama tekhnologi digital yang tengah berkembang pesat saat ini seperti dalam bantuk *start up*.

Inilah yang mendorong cikal bakal terbentuknya Vestanesia, sebuah *start up* yang memfokuskan diri pada pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan melalui konsep s*ociopreneurship* yang membuka ruang partisipasi bagi semua pihak untuk terlibat dalam usaha pertanian. Suatu sistem pertanian yang berbasis digital dan pengembangan teknologi informasi, melalui prinsip gotong royong, menyejahterakan dan berwawasan lingkungan.

Adalah Muh. Ilmi Ikhsan Sabur, Direktur Eksekutif dan mahasiswa tingkat akhir Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, bersama tim yang beranggotakan 12 orang mendirikan Vestanesia. Vestanesia mengembangkan sebuah *platform* untuk petani, khususnya petani muda untuk mendapatkan akses modal dan juga akses pasar yang lebih luas. Targetnya, mencetak lebih banyak petani dari kalangan anak muda untuk menjaga semangat baru terus bertumbuh di sektor pertanian.

"Kami melihat bahwa salah satu solusi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah memanfaatkan potensi digital yang ada, baik itu berkaitan dengan budi daya, maupun di luar budidaya. Jadi, kami berusaha untuk menganalisis penggunaan teknologi baru yang mungkin bisa meningkatkan produksi maupun kualitas budi daya yang dilakukan petani," kata Ilmi.

Untuk itu, beberapa langkah strategi tengah dijalankan Ilmi bersama tim di Vestanesia. Pertama, Vestanesia membangun demplot di lokasi yang potensial, dengan melakukan analisis sebelumnya, mempelajari kemungkinan kerja sama kolaborasi komunitas baru ataukah penerapan tekhnologi manajemen yang baru di sektor pertanian. Setelah demplot selesai, Vestanesia mencoba semusim, apabila berhasil barulah diterapkan kepada petani, masyarakat dan pemuda sekitar. Jika musim ini, melibatkan 20 orang, maka musim berikutnya diperluas menjadi 40 orang dan seterusnya, sehingga tercipta industri.

Dari situ petani dihubungkan dengan bank melalui sistem KUR, dihubungkan secara digital kepada masyarakat umum yang bisa bergabung dalam membuat usaha tersebut ataupun mendanai pertanian para petani melalui konsep *peer to peer lending*, Vestanesia menyebutnya dengan mitra petani. Nah mitra petani ini nantinya akan mendapatkan bagi hasil saat panen.

Setelah berhasil membuat demplot, mempelajari akses pasar dan manajemennya. Kemudian metode ini diajarkan kepada petani untuk diduplikasi ke lahan-lahan petani lainnya. Sehingga petani tidak takut lagi untuk mencoba budidaya produk, semakin terbuka ruang bagi petani untuk melakukan uji coba.

Tak terhenti sampai di situ, Vestanesia juga melakukan supervisi dan monitoring untuk mempelajari apa apa yang masih kurang dan membutuhkan perbaikan ke depannya. “Jadi kami sebagai teman tumbuh bagi petani, selama proses itu, kami damping betul-betul hingga saat panen dan memasarkan hasil panen petani secara digital”, ujar Ilmi.

Untuk pemasaran, Vestanesia membangun pasar alternatif dengan menghubungkan petani langsung ke agen-agen Vestanesia yang berada di kompleks perumahan sebagai konsumen akhir. Sehingga rantai distribusi dapat dipangkas. Tak hanya itu, Vestanesia juga membantu menghubungkan petani dengan UMKM, restoran, warung yang membutuhkan hasil pertanian sebagai bahan baku produksi mereka. Serta mendorong petani untuk mampu melakukan ekspor hasil panen mereka, sampai pada hilirisasi di mana petani tak hanya menjual bahan baku mentah namun sudah diolah menjadi produk untuk meningkatkan nilai jualnya. Nantinya ketika pasar telah terbentuk, petani sendiri yang mengemas produknya, membuat merek, sehingga di tiap daerah muncul produk-produk unggulan yang dirintis dan diproduksi oleh petani lokal.

Foto: **Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI**

Dengan ekosistem digital itu, ada harapan baru bagi petani yang awalnya skala kecil dan tergantung dengan tengkulak, sekarang mereka punya opsi baru. Walau terbilang pendatang baru, berdiri sejak September 2020. Namun, Vestanesia telah memberikan hasil nyata dengan meningkatkan pendapatan petani yang tergabung dalam usaha ini. Terlebih di masa pandemi, pertanian merupakan salah satu penyangga perekonomian Indonesia, perilaku konsumsi masyarakatpun turut berubah dari yang awalnya enggan berbelanja *online*, namun karena pandemi mengharuskan mereka untuk beradaptasi. Momentum ini turut dimanfaatkan oleh Vestanesia selain untuk memasarkan pertanian secara *online* juga meyakinkan masyarakat tentang pentingnya sektor pertanian. "Kita butuh petani 3 kali sehari, berbeda dengan profesi lainnya. Jadi jangan takut jadi petani", imbuh Ilmi penuh semangat.

Semangat Vestanesia untuk menunjukkan potensi besar yang dapat digarap dari sektor pertanian ditunjukkan dengan mengedukasi masyarakat khususnya anak muda melalui berbagai platform digital dan media sosial seperti YouTube, Instagram dan TikTok.

Saat ini Vestanesia ada di di Sulawesi Tenggara (Baubau dan Bombana) dan di Sulawesi Selatan (Barru dan Bulukumba) dan ke depannya akan fokus untuk pengembangan pertanian terutama di wilayah Kawasan Timur Indonesia. Hal ini karena potensi yang luar biasa dari sektor pertanian di kawasan Timur yang memiliki luasan lahan pertanian yang besar tapi fasilitas infrastruktur dan dan akses pembiayaan masih belum sepenuhnya memadai.

Jika selama ini, khalayak umum yang ingin mengakses Vestanesia dapat mengunjungi website www.vestanesia.com, ke depannya Vestanesia tengah membuat aplikasi yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja.

"Mimpi kami di Vestanesia, kami ingin petani sejahtera, tercipta inklusi keuangan di sektor pertanian sehingga semua orang dapat menikmati dampak dari sektor pertanian". Dan mimpi saya pribadi "Saya ingin profesi petani sebagai profesi yang diidam-idamkan semua anak Indonesia, bagaimana caranya? Dengan meningkatkan kualitas hidup, status sosial petani itu sendiri". Pungkas Ilmi.

Vestanesia sedang berjalan menemui mimpi-mimpinya, mencetak generasi muda terlibat menyediakan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat hari ini dan nanti dengan mendukung petani-petani muda dan melibatkan masyarakat untuk bergotong royong di sektor pertanian untuk kesejahteraan bersama.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Info lengkap: **https://vestanesia.com**
Instagram, FB dan Twitter dan YouTube **@Vestanesia**

Orang-orang Maluku dan Deklarasi 16 September 1945

Oleh **DR. INDRA ISKANDAR**

Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Maluku mempunyai posisi yang unik. Di satu sisi, banyak pemuda dari wilayah ini yang menjadi tentara di KNIL (*Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger*, Angkatan Bersenjata Belanda). Bahkan konon, di masa masa sebelumnya banyak juga warga Maluku yang menjadi tentara bayaran Belanda.

Namun di sisi lain, jangan dilupakan juga bahwa Maluku menyumbangkan gagasan yang krusial terhadap teks Pancasila. Tokoh-tokoh Maluku pun banyak yang berperan penting dalam mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Masyarakat Maluku, melalui tokoh-tokohnya, terutama Johanes Latuharhary ikut mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan dan turut hadir pada saat perumusan Naskah Proklamasi. Latuharhary melakukan lobi secara personal kepada Soekarno untuk menyampaikan gagasan bahwa rumusan terbaik dari sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Titik tanpa koma. Bung Karno setuju.

Kelak terbukti, gagasan Latuharhary tersebut sangat krusial dalam rumusan teks Pancasila. Bayangkan, bagaimana jika rumusan sila pertama dalam Pancasila berbunyi: "Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya?" Barangkali Indonesia sudah tercabik-cabik menjadi beberapa negara berbeda atau minimal menjadi puluhan negara bagian dalam bentuk federasi. Atau barangkali

Johannes Latuharhary mendampingi Sukarno dalam kunjungan di Ternate, Maluku. Sumber: **Arsip Nasional**

Indonesia sudah berada dalam perang saudara yang berkepanjangan seperti Suriah saat ini.

Menurut Bapak Bangsa dari Maluku itu alasan rumusan "Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya" kurang ideal, karena hanya berlaku untuk kelompok tertentu. Sementara sebuah konstitusi harus berlaku untuk semua kelompok, semua agama, semua etnis, dan seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian.

Selain itu, rumusan sila pertama tadi juga dianggap menyulitkan bagi wilayah tertentu untuk ditarik ke dalam wilayah Republik Indonesia. Ia kuatir menjadi wilayah yang dianaktirikan dalam segala aspek kehidupan, karena tidak termasuk dalam rumusan sila pertama: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Belanda sudah pasti sangat menyukai rumusan sila pertama yang panjang tadi, karena bisa digunakan untuk melakukan politik *devide et impera*, pecah belah, lalu kuasai. Di sekitar tahun 1945-1950, bahkan sampai kini, pecah belah berdasarkan sentimen agama cukup efektif untuk mencerai beraikan persatuan di tanah air. Sebagai bangsa yang baru bersatu dan belum mengenal secara mendalam satu sama lain, sudah pasti provokasi karena perbedaan agama untuk melakukan *devide et impera* akan mudah direalisasikan.

Namun, berkat lobi tokoh-tokoh dari Maluku dan Indonesia bagian timur lainnya, celah untuk menghancurkan Proklamasi Republik Indonesia

Bala tentara KNIL di Indonesia. Sumber: **Arsip Nasional**

menjadi tertutup. Sehingga sampai kini, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih berdiri kokoh dan tegak.

Sumbangsih penting lain dari Maluku dalam upaya mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah "Deklarasi 6 September 1945". Pada hari dan tanggal itu, orang-orang Maluku yang ada di Jawa berkumpul di Jakarta lalu menghadap Presiden Soekarno untuk menyatakan tekad bahwa seluruh rakyat Maluku mendukung penuh Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebulatan tekad ini memberikan pengaruh besar, terutama secara politik.

Misal, orang-orang Maluku yang menjadi anggota KNIL, karena adanya deklarasi tersebut, tidak bisa mewakili dan tidak bisa mengatasnamakan Maluku. Tapi bersifat oknum perseorangan. Karena itu, mereka tidak berhak untuk membuat pernyataan politik, misalnya, menginginkan agar Maluku berdiri sendiri dan terpisah dari Republik Indonesia.

Deklarasi 6 September 1945 juga memicu perpecahan internal di kalangan KNIL. Ini terjadi karena-dengan "Deklarasi 6 September 1945" banyak tentara KNIL khususnya yang berasal dari Maluku, kemudian bergabung dengan saudara-saudaranya, warga Maluku, berjuang bersama mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Berkat deklarasi tadi, upaya-upaya untuk menjadikan Maluku sebagai negara sendiri yang merdeka, seperti dilakukan Soumukil dengan mendeklarasikan RMS (Republik Maluku Selatan) tidak bisa bertahan lama. RMS tidak mendapatkan dukungan dari rakyat Maluku Selatan, apalagi dari rakyat Maluku seluruhnya.

Memang, sampai kini tidak ditemukan literatur yang menyebutkan bahwa pernyataan tekad masyarakat Maluku di hadapan Presiden Soekarno sebagai "Deklarasi 6 September 1945". Media dan berbagai literatur menyebutnya sebagai peristiwa biasa saja. Namun dampak politis dari peristiwa itu bagi masyarakat Maluku sangat besar, sehingga layak untuk disebut sebagai deklarasi. Seperti Kongres Pemuda II Tahun 1928, bagi Belanda adalah peristiwa biasa saja. Namun dengan adanya Sumpah Pemuda yang dihasilkannya, maka peristiwa itu menjadi luar biasa. Sumpah Pemuda sangat berpengaruh di masa itu. Bahkan sampai kini.

Nah, peristiwa 6 September 1945, saat itu barangkali hanya dianggap pernyataan biasa oleh Belanda. Namun bagi masyarakat Maluku, pengaruhnya seperti Sumpah Pemuda terhadap kebangkitan nasionalisme di seluruh Indonesia. Kalau Sumpah Pemuda berpengaruh terhadap pemuda di seluruh Indonesia, maka "Deklarasi 6 September 1945" berpengaruh terhadap seluruh masyarakat Maluku di masa itu. Bahkan sampai sekarang.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari : **https://geotimes.id/kolom/orang-orang-maluku-dan-deklarasi-16-september-1945/**

ROAD TO FESTIVAL
FORUM KAWASAN TIMUR
INDONESIA

26 - 27 Oktober 2021

Semangat Kolaborasi untuk Indonesia

Ada jalan panjang berliku menuju pelaksanaan Festival Forum KTI tahun 2022. Sedianya Festival Forum KTI akan dilaksanakan tahun ini di Nusa Tenggara Timur, namun pandemi COVID-19 mengurungkan niat perayaan lahirnya beragam inisiatif yang berhasil menjawab berbagai tantangan pembangunan di berbagai pelosok di kawasan timur Indonesia.

Road to Festival Forum Kawasan Timur Indonesia adalah sebuah acara yang bersifat nasional untuk memperkenalkan beragam inisiatif cerdas pembangunan dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi yang menunjukkan keberhasilan kolaborasi berbagai pihak dalam mengatasi tantangan pembangunan di kawasan Timur Indonesia.

Road to Festival Forum KTI yang akan diselenggarakan secara *online* akan mengangkat tema 'Semangat Kolaborasi untuk Indonesia' dan akan dilaksanakan pada 26 - 27 Oktober 2021 melalui aplikasi Zoom.

Dalam pertemuan ini, kami mengajak Anda untuk melihat lebih jauh pada bagaimana sebuah inisiatif yang lahir masyarakat di kawasan timur Indonesia jika dikerjakan dalam semangat kolaborasi dapat menjawab beragam tantangan pembangunan.

Dengan bangga kami persembahkan inisiatif cerdas di *Road to* Festival Forum KTI

Sistem Pertanian Terintegrasi

Gesti memulai usaha pertanian di November 2013. Visinya adalah membebaskan masyarakat dari kelaparan dan kemiskinan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ia memulai pertanian organik terpadu. Tidak hanya menggenjot produksi, juga berkomitmen menghasilkan produk pertanian yang sehat bagi masyarakat.Bersama para petani fokus dengan pertanian organik yang ramah lingkungan dan mengembangkan korporasi petani melalui CV. GS Organik

Pengetahuan untuk Kebijakan

Program rintisan Penyusunan Kebijakan Berbasis Pengetahuan ingin menunjukkan siklus penyusunan kebijakan berbasis bukti, di mana suatu agenda prioritas daerah didukung melalui sebuah kajian terapan yang menjadi dasar penyusunan suatu kebijakan.

Untuk mewujudkannya, telah dilaksanakan serangkaian diskusi multipihak dalam rangka mengidentifikasi, menyepakati dan merekomendasikan isu prioritas yang perlu dikaji secara mendalam melalui tahapan proses agenda setting.

Optimalisasi PAD melalui Pajak dan Retribusi *Online*

Belum optimalnya pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara maka badan pendapatan daerah melakukan inovasi optimalisasi PAD dengan membangun sistem *online* pajak dan retribusi daerah (SI-PARADE). Sistem ini dibangun tidak hanya untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah tetapi juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak, serta juga menciptakan kepatuhan dan ketepatan waktu membayar pajak sesuai waktu jatuh tempo yang ditetapkan. Sistem ini juga sebagai media untuk mensosialisasikan regulasi-regulasi tentang pajak dan retribusi daerah.

Sejahtera dengan Perencanan Pembangunan yang Sinergis Kampung dan Unit Layanan

Sinergi Perencanaan adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah kampung bersama unit layanan pendidikan dan kesehatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di kampung dengan cara bersama-sama mensinergikan rencana pembangunan dalam Musrenbangkam mulai dari proses pemetaan dan perumusan masalah, hingga langkah-langkah penyelesaian masalah. Kampung dan unit layanan berkomitmen memberikan kontribusi sesuai tupoksi dan memastikan komitmen kontribusinya terlaksana dengan memasukkannya ke dalam dokumen perencanaan kegiatan masing-masing. Dengan mensinergikan rencana pembangunan, penyelesaian masalah di kampung dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Posyandu Prakonsepsi: Satu Tahap Lebih Dulu

Program ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pendampingan kepada wanita prakonsepsi untuk meningkatkan asupan gizi calon ibu dan ibu hamil guna menekan penyebab kematian ibu," ujar Bupati Banggai Herwin Yatim saat diwawancarai dengan Tim Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) beberapa waktu lalu.

Penyebarluasan informasi terkait kebutuhan asupan gizi bagi calon dan ibu hamil ini melibatkan *stakeholders* dari berbagai sektor. Mulai dari peran petugas puskesmas, bidan desa, kader posyandu, KUA, hingga camat, lurah, dan kepala desa, turut berpartisipasi untuk keberhasilan program ini

Melayani Kebutuhan Kesehatan Flores Timur

Minimnya sarana transportasi menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian ibu dan anak. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya sarana transportasi baik sarana transportasi umum untuk masyarakat, maupun untuk petugas kesehatan itu sendiri. Banyak ibu hamil dan melahirkan terpaksa meregang nyawa ketika mereka terlambat mendapatkan layanan kesehatan. Dari persoalan inilah kemudian lahir ide untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengembangkan Program Manajemen Sarana Transportasi (MST) kerusakan minimum untuk Pelayanan Kesehatan di Pedesaan.

Dengan kekuatan utama berupa penjangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat pedesaan, menyediakan logistik kesehatan, diseminasi informasi tentang isu-isu kesehatan, menyediakan kendaraan bermotor untuk petugas kesehatan, dan Pengelolaan Kerusakan Minimum kendaraan bermotor untuk penjangkauan layanan kesehatan.

Info lengkap tautan **https://bakti.or.id/forum-kti**

Kunjungi media sosial kami untuk mendapatkan informasi tentang Road to Festival Forum KTI melalui:

Yayasan BaKTI **Instagram: infobakti** **Twitter: @infobakti**

Acara ini dipersembahkan oleh **Forum Kawasan Timur Indonesia & Yayasan BaKTI**